



# 2016 LAPORAN TAHUNAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jl. Pendidikan No 2 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon: (0370) 7505 330 Faximile: (0370) 7505 330

Email: bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id

Website: bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id



@kesbangpolntb



fb.com/bakesbangpoldagriprovntb

## **KATA PENGANTAR**

PujisyukurkamipanjatkankehadiratAllah  
SWTatassegalarahmatdanhidayahNya,  
penyusunanLaporanTahunanBakesbangpoldagri 2016 dapatdibuatseparatepatwaktu.  
Pelaksanaan program dankegiatan selama satutahun yang  
tertuangdalamlaporaninisecarakeseluruhanhnyamenggunakan APBD  
BakesbangpoldagriProvinsi NTB Tahun 2016.Padadasarnyasemua program  
dankegiatantelahdapatdilaksanakandenganbaik,  
meskipunrealisasikeuangansebesar99,41. Adapunkegiatan yang  
tidakdapatdilaksanakankarenasifatnyatentatifyaitutergantungdenganjadwalpihaklain,  
misalnyakegiatanfasilitasikedatanganpresiden.

Laporan tahunan Bakesbanpoldagri Provinsi NTB Tahun 2016 ini tidak hanya menjadi bahan pertanggung-jawaban, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang. Semoga kendala dan hambatan selama tahun 2016 yang diungkap dalam laporan ini menjadi pelajaran sehingga kinerja Tahun 2017 dapat ditingkatkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam penyusunan laporan ini, tidak lupa kami sampaikan terima kasih.

Mataram,Februari2017  
KEPALA BAKESBANGPOLDAGRI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DRS. H. LALU SYAFI'I, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611231 198203 1 440

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum .....	2
D. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II Kondisi Umum Kesbangpol daerah Provinsi NTB .....	4
A. Visi dan Misi .....	4
B. Struktur Organisasi .....	4
BAB III Kebijakan dan Program/Kegiatan Tahun 2016 .....	20
A. Kebijakan .....	20
B. Program dan Kegiatan.....	21
BAB IV Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	24
A. Sekretariat .....	24
B. Bidang Pengkajian Masalah Strategis & Penanganan Konflik .....	31
C. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan .....	38
D. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas .....	49
BAB V Pelaksanaan Keuangan Tahun Anggaran 2016 .....	61
BAB VI Permasalahan dan Upaya Pemecahan .....	57
A. Permasalahan.....	64
B. Upaya Penyelesaian .....	64
C. Rekomendasi .....	65
D. Kesimpulan .....	65
BAB VII PENUTUP .....	67
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Menjelang akhir tahun 2016, berbagai permasalahan masih mewarnai situasi dan kondisi stabilitas daerah Provinsi NTB yang salah satunya adalah maraknya konflik baik konflik horizontal maupun vertikal di beberapa wilayah kab/kota. Berbagai upaya telah dilakukan dengan metode dan pendekatan yang dianggap sesuai dalam rangka mengatasi konflik tersebut. Meskipun telah dilakukan penanganan konflik melalui pendekatan kultural (budaya lokal), keamanan, dan penegakan hukum, namun masih juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu sebab terjadinya konflik ini karena masih rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan masih minimnya perhatian dan pengawasan Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) terhadap gerakan-gerakan dari kelompok garis keras yang senantiasa memanfaatkan moment-moment tertentu sebagai pemicu konflik. Disamping itu, faktor lainnya seperti pemahaman agama, kondisi ekonomi, karakteristik budaya, dan lain sebagainya.

Namun demikian, kita masih patut bersyukur karena pembangunan kehidupan politik masyarakat NTB menunjukkan adanya kemajuan dan perbaikan yang cukup signifikan. Meski kewajiban partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan, namun pemerintah masih terus mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam pendidikan politik masyarakat.

Gambaran kondisi sosial dan politik masyarakat NTB diatas telah menjadi acuan penyusunan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB, sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013 – 2018 dan Renstra Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018. Bakesbangpoldagri Provinsi NTB terus berupaya untuk menciptakan stabilitas daerah yang mantap guna mendukung pembangunan di berbagai bidang. Dimaklumi bersama bahwa tanpa dukungan stabilitas yang mantap, mustahil program-program unggulan daerah berjalan dengan baik dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Begitu pula sebaliknya, kegagalan bidang pembangunan lainnya akan memicu terjadinya instabilitas, dan oleh

karenaitusemua bidang perlu dibangun secara paralel dan simultan, dan bersinergis guna memberikan hasil yang optimal.

Sepanjang tahun 2016, Bakesbangpoldagri telah melakukan berbagai kegiatan baik yang pendanaannya melalui APBD NTB maupun non APBD yang dapat digambarkan dalam Laporan Tahunan ini.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Tahunan Bakesbangpoldagri Tahun 2016 adalah untuk menyediakan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan selama satu periode pelaporan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Tahun ini adalah tersedianya program/kegiatan yang memadai dalam mengatasi berbagai keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (kamtramtibmas) sehingga terwujudnya kondisi masyarakat yang toleran dan aman.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah-wilayah Daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi NTBNomor .. Tahun 2015, tanggal Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2016, tanggal ..... 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor ... Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Laporan Tahunan Kesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar
- b. Daftar Isi
- c. Bab I Pendahuluan
- d. Bab II Kondisi Umum Kesbangpoldagri Provinsi NTB
- e. Bab III Kebijakan dan Program Kerja
- f. Bab IV Pelaksanaan Kegiatan
- g. Bab V Keuangan
- h. Bab VI Masalah dan Solusi
- i. Bab VII Program Kerja Tahun 2017

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### **VISI**

”Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing Dan Sejahtera.”

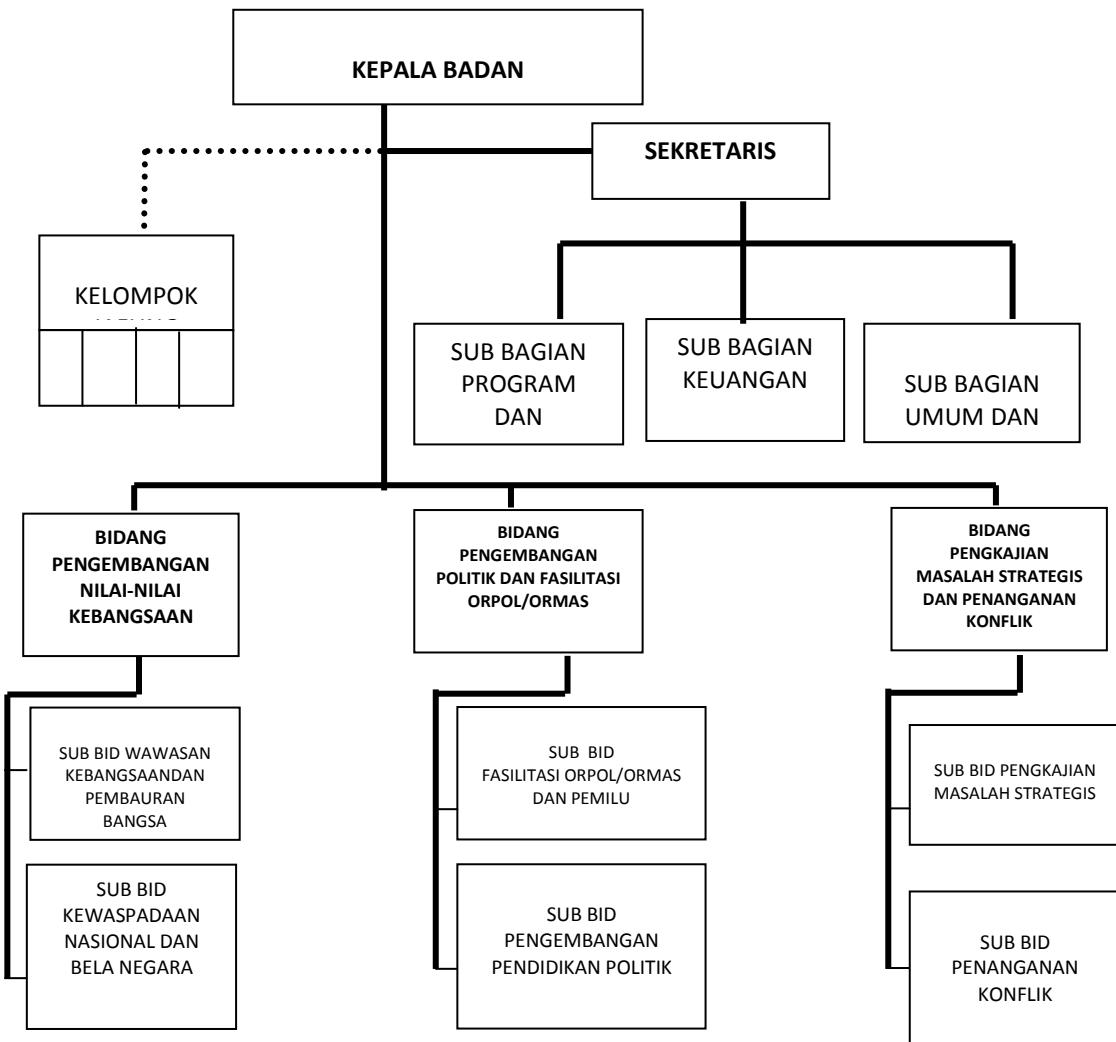
##### **MISI**

1. Mengembangkan masyarakat madani, berahlak mulia, berbudaya, menghormati pluralistik dan kesetaraan gender;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas;
3. Menumbuhkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menegakkan supremasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah;

#### **B. STRUKTUR ORGANISASI**

##### **B.1. Struktur Organisasi**

Bakesbangpoldagri NTB adalah salah satu SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pergub NTB Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. Adapun struktur organisasi seperti pada Gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bakesbangpoldagri NTB

## B.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB No. 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Prov NTB, pada paragraf 1 pasal 85 disebutkan tugas dan fungsi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sebagai berikut:

### Tugas pokok:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

### Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

3. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional**

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :
  1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
  2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
- d. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Politik;
  2. Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.
- e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
  2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Kepala Badan**

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi (desentralisasi) di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. pemberian dukungan atas urusan pemerintahan di bidang Kesatuan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. penyediaan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- e. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
  - b. pengelolaan urusan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , membawahi :

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;

#### *Tugas:*

menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan

#### *Rincian tugas :*

1. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
2. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan ;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
4. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan;

*Tugas:*

melaksanakan pengelolaan urusan keuangan

*Rincian Tugas:*

1. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
2. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
3. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Badan baik rutin maupun pembangunan;
4. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
5. mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
6. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

*Tugas :*

melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Badan

*Rincian Tugas :*

1. melakukan urusan ketatausahaan;
2. melakukan urusan kepegawaian;
3. melaksanakan urusan perlengkapan;
4. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
5. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

#### **Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan**

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan ideologi dan pengembangan kewaspadaan nasional;
  - c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa dan kewarganegaraan;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara;
  - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa; dan
  - f. evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
- (3) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (4) Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, membawahi :

- a. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;

*Tugas:*

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewarganegaraan, sumber daya pranata sosial dan budaya bangsa

*Rincian Tugas:*

1. menyusun rencana/program kerja;
  2. monitoring dan evaluasi di bidang wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
  3. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.

*Tugas :*

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kewaspadaan nasional, ideologi dan pemantapan bela Negara

*Rincian Tugas :*

1. menyusun rencana/program kerja;
2. monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan nasional dan bela negara;
3. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(5) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan.

#### **Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas**

(1) Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengembangan politik dan fasilitasi orpol/ormas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan etika politik;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pendidikan politik;
  - c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan budaya politik;
  - d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik;
  - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi lembaga perwakilan;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemilihan umum;
  - g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan partisipasi politik;
  - h. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi politik;
  - i. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemantauan dan pelaporan;
  - j. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan parpol;
  - k. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi profesi;
  - l. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
  - m. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan; dan
  - n. evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan politik dan fasilitasi orpol/ormas.
- (3) Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (4) Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas, membawahi :
- a. Subbidang Pengembangan Pendidikan Politik;
- Tugas:*

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan politik, pendidikan politik, budaya politik, pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan politik, serta komunikasi dan sosialisasi politik.

*Rincian Tugas:*

1. menyusun rencana/program kerja;
  2. monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan pendidikan politik;
  3. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Subbidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu.

*Tugas:*

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan parpol, pengembangan organisasi profesi, pemberdayaan organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, pengembangan organisasi kemasyarakatan, lembaga perwakilan, pemilihan umum, pengembangan partisipasi politik, pemantauan dan pelaporan.

*Rincian Tugas:*

1. menyusun rencana/program kerja;
2. monitoring dan evaluasi di bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu;
3. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Masing-masing Subbidang, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas.

**Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik**

(1) Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengkajian masalah

strategis dan penanganan konflik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah strategis bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial 41 budaya, hak asasi manusia, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi analisis potensi konflik sosial; c. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penangkalannya gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi sosial; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan keamanan; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas; g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik.
- (3) Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- (4) Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, membawahi :
  - a. Subbidang Pengkajian Masalah Strategis;

*Tugas:*

melaksanakan penyiapan strategis yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hak asasi manusia, bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi pelaksanaan pengkajian masalah ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

*Rincian Tugas:*

1. menyusun rencana/program kerja;
2. monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian masalah strategis;
3. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- b. Subbidang Penanganan Konflik.

*Tugas:*

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis potensi konflik, pencegahan dan penangkalan gangguan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, rekonsiliasi sosial, penanganan konflik pemerintah dan keamanan, pengembangan kapasitas, rehabilitasi dan rekonstruksi.

*Rincian Tugas:*

1. menyusun rencana/program kerja;
  2. monitoring dan evaluasi di bidang penanganan konflik;
  3. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (5) Masing-masing Subbidang, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan

**B.3. Kepegawaian**

Pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB terhitung sampai 31 Desember 2016 berjumlah 58 orang.

Berikut ini akan disajikan kondisi kepegawaian ditinjau dari beberapa segi yaitu segi pendidikan, kepangkatan dan golongan, jabatan.

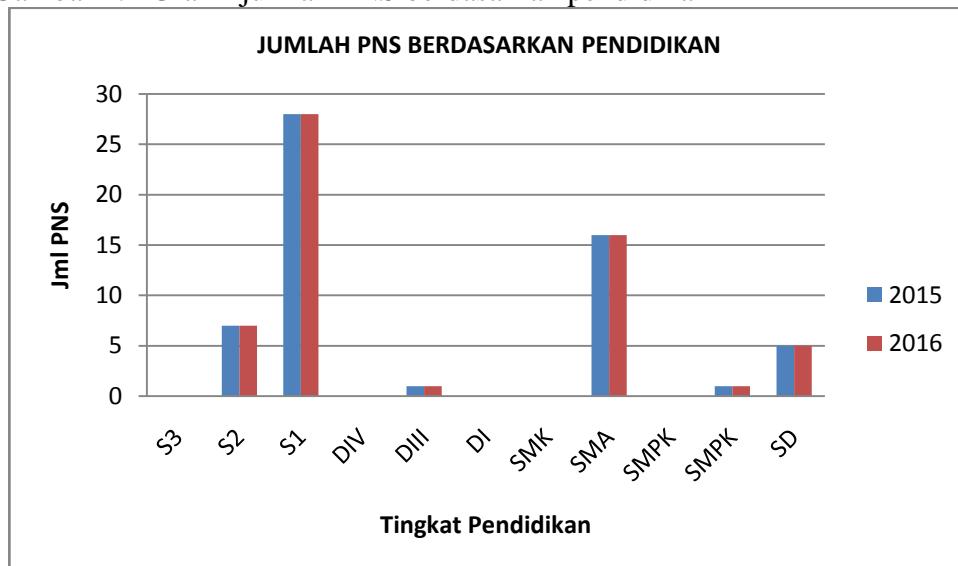
## Tingkat Pendidikan

Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan dapat diuraikan berdasarkan table 2.1 dan Gambar 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah pengawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan pendidikan

NO.	Uraian	Tahun 2015 (Orang)	Tahun 2016 (Orang)
1.	Pendidikan Doktoral / S-3	0	0
2.	Pendidikan Pasca Sarjana / S-2	7	7
3.	Pendidikan Saraja / S-1	28	28
4.	Pendidikan Diploma / D.IV	0	0
5.	Pendidikan Diploma / D.III	1	1
6.	Pendidikan Diploma / D.I	0	0
7.	Pendidikan SMK	0	0
8.	Pendidikan SMA	16	16
9.	Pendidikan SMPK	0	0
10.	Pendidikan SMP	1	1
11.	Pendidikan SD	5	5
12.	Jumlah	58	58

Gambar 2.2 Grafik jumlah PNS berdasarkan pendidikan



Kondisi kepegawaian ditinjau dari segi pendidikan tidak mengalami perubahan dari tahun 2015 karena karena tidak ada mutasi pegawai dan tidak ada pegawai yang meanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan pegawai dilakukan pembinaan baik secara internal maupun eksternal melalui diklat.

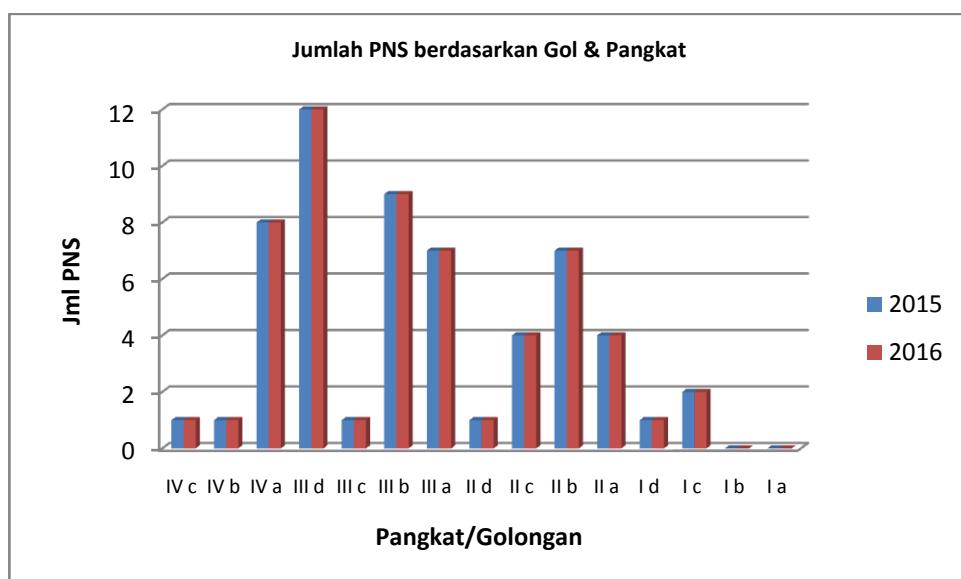
## Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB berdasarkan pangkat dan golongan sampai dengan 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan pangkat dan golongan

No.	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Pembina Utama Muda – IV c	1	1
2.	Pembina Tk. I – IV b	1	1
3.	Pembina – IV a	8	8
4.	Penata Tk. I – III d	12	12
5.	Penata – III c	1	1
6.	Penata Muda Tk. I – III b	9	9
7.	Penata Muda – III a	7	7
8.	Pengatur Tk. I – II d	1	1
9.	Pengatur - II c	4	4
10.	Pengatur Muda Tk. I – II b	7	7
11.	Pengatur Muda – II a	4	4
12.	Juru Tk. I - I d	1	1
13.	Juru – Ic	2	2
14.	Juru Muda Tk. I - Ib	0	0
15.	Juru Muda – Ia	0	0
	Jumlah	58	58

Gambar 2.3 Grafik jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan



Dari table 2.2 dan gambar 2.3 diatas menunjukkan bahwa selama kurung waktu 1 tahun tidak ada pegawai yang naik pangkat.

## Jabatan

Jumlah jabatan berdasarkan eselonisasi dan jabatan fungsional Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Jumlah pegawai Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dirinci berdasarkan jabatan

No.	Uraian	2015	2016
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	4
3.	Eselon IV	9	9
4.	Jabatan Fungsional Umum	0	0
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	0	0
6.	Staf	44	44
	Jumlah	58	58

## B.4. Pengelolaan Aset

Tabel 2.3 Jumlah asset Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2016

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
<b>I. PRASARANA</b>						
1.	Tanah Bangunan	1	1	-	-	
2.	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-	
<b>II. SARANA</b>						
1.	Station Wagon	1	-	-	1	
2.	Mini Bus	7	7	-	-	
3.	Pick Up	1	1	-	-	
4.	Sepeda Motor	29	22	1	6	
5.	Sepeda	2	-	-	2	
6.	Mesin Ketik Manual	3	1	2	-	
7.	Mesin Absen	1	1	-	-	
8.	Rak Kayu	14	10	4	-	
9.	Filling Besi	5	2	3	-	
10.	Filling Kayu	8	-	8	-	
11.	Brand Kas	4	4	-	-	
12.	Lemari Kayu	9	6	3	-	
13.	Papan Pengumuman	14	14	-	-	
14.	White Board	2	2	-	-	
15.	Display	2	1	1	-	
16.	Meja Rapat	18	18	-	-	
17.	Meja Telpon	3	3	-	-	
18.	Meja Tik	1	1	-	-	
19.	Kursi Tamu	2	2	-	-	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
20.	Kursi Tangan	11	8	3	-	
21.	Kursi Putar	5	2	3	-	
22.	Kursi Biasa	26	16	10	-	
23.	Bangku Tunggu	1	1	-	-	
24.	Kursi Lipat	125	122	3	-	
25.	Meja Biro	1	1	-	-	
26.	Jam Elektronik	6	6	-	-	
27.	Mesin Penghisap Debu	1	1	-	-	
28.	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-	
29.	Lemari Es	2	2	-	-	
30.	AC Unit	15	15	-	-	
31.	Kipas Angin	3	3	-	-	
32.	Radio	1	-	1	-	
33.	Televisi	5	5	-	-	
34.	Mic Wireless	1	1	-	-	
35.	Camera Video	1	1	-	-	
36.	Lambang Garuda Pancasila	2	2	-	-	
37.	Tangga Aluminium	1	1	-	-	
38.	Kaca Hias	2	2	-	-	
39.	Dispenser	4	4	-	-	
40.	Mimbar/ Podium	1	-	1	-	
41.	Handy Cam	4	4	-	-	
42.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	2	-	-	
43.	PC Unit	4	4	-	-	
44.	Laptop	5	4	1	-	
45.	Note Book	5	4	1	-	
46.	Personal Komputer Lain-lain	9	9	-	-	
47.	CPU	1	-	1	-	
48.	Perlatan Komputer Mainframe Lain-Lain	4	4	-	-	
49.	Printer	16	15	1	-	
50.	UPS	1	-	1	-	
51.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	57	49	8	-	
52.	Meja Tamu Ruangan Biasa	6	5	1	-	
53.	Buffet Kayu	2	-	2	-	
54.	Camera	5	5	-	-	
55.	Microphone Floor	4	1	3	-	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
	Stand					
56.	UPS	1	1	-	-	
57.	Sound System	1	1	-	-	
58.	Pesawat Telephone	2	2	-	-	
59.	Handy Talky	3	3	-	-	
60.	Faximilie	1	1	-	-	
61.	Gambar Presiden	2	2	-	-	
62.	Gambar Wakil Presiden	2	2	-	-	

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016**

#### **A. KEBIJAKAN**

##### **1.1 Strategi**

Untuk mewujudkan pencapaian visi, misi serta tujuan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Srategis (Renstra) Tahun 2009 – 2013 Bakesbangpoldagri ProvinsiNTB, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara melalui perumusan strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung kinerja organisasi.
- b. Sosialisasi, mobilisasi dan edukasi masyarakat yang diarahkan pada budaya tertib
- c. Pelatihan, Bimtek dan edukasi masyarakat yang diarahkan pada penguatan kemanan dan ketertiban lingkungan.
- d. Sosialisasi, mobilisasi dan edukasi masyarakat yang diarahkan 4 pilar kebangsaan
- e. Edukasi, matrikulasi dan fasilitasi perwujudan suasana politik yang santun dan bertanggungjawab yang diarahkan pada pendidikan kesadaran politik masyarakat
- f. Matrikulasi, mobilisasi dan fasilitasi Ormas dan Orpol yang diarahkan pada Kepekaan terhadap masalah sosial politik.
- g. Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan edukasi kepada masyarakat yang diarahkanpada ideologinasional dan budaya daerah.
- h. fasilitasi Ormas dan Orpol yang diarahkan pada Kepekaan terhadap masalah sosial politik.
- i. Koordinasi perkuatan aturan hukum yang diarahkan pada Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- j. Koordinasi dan mobilisasi pencegahan dan penanganan penyebaran dan penggunaan narkotika yang diarahkan pada kalangan generasi muda, aparatur dan masyarakat.
- k. Sosialisasi, koordinasi dan deradikalisisasi kepada masyarakat yang diarahkan pada nilai-nilai keagamaan.

1. Sosialisasi, koordinasi, dan fasilitasi kepada masyarakat yang diarahkan pada masyarakat rawan konflik.

## 1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan Umum :

1. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial;
2. Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural;
3. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat, etnis, kelompok dan daerah

Kebijakan Teknis:

- a. Peningkatan daya dukung sarana & prasarana perkantoran
- b. Tata kelola keuangan yg transparan
- c. Pembangunan partisipatif, komprehensif dan koordinatif
- d. Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat/budaya
- e. Kondusifitas lingkungan kemasyarakatan
- f. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara
- g. Mengembangkan pola rekrutmen dan kaderisasi orpol dan ormas
- h. Kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat dan organisasi politik
- i. Kerjasama antara organisasi politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat/budaya
- j. Penguatan Parpol dan Ormas
- k. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- l. Kerjasama antara aparat penegak hukum, toga, toma dan lembaga pendidikan
- m. Mengembangkan fungsi lembaga dan majelis keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat/budaya Kerjasama dengan aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat/budaya

## B. PROGRAM/KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu instansi guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Maka untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB telah menyusun program Instansi.

Pada Tahun Anggaran 2016, penyelenggaraan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB melaksanakan 10 program terdiri atas 24 kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - h. Penyediaan makanan dan minuman
  - i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
  - j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - a. Pembangunan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - a. Pendidikan dan pelatihan formal
  - b. Peningkatan mental dan fisik aparatur
- 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan rencana kerja SKPD
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
  - a. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
- 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
  - a. Pengendalian keamanan lingkungan
- 7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**

- a. Pencegahan, penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat
8. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
- a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
  - b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
  - c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
9. **Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**
- a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
10. **Program pendidikan politik masyarakat**
- a. Penyuluhan kepada masyarakat.
  - b. Penyelesaian perselisihan partai politik.
  - c. Penyusunan data base partai politik.
  - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. SEKRETARIAT**

Terdapat enam program yang menjadi tanggung jawab Sekretariat dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan hasil yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

##### **A.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

###### a. Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat, berupa belanja perangko dan biaya pengiriman serta belanja surat kabar/media massa hanya dapat direalisasikan sekitar 70%. Hal ini disebabkan oleh jumlah surat yang dikirim melalui Kantor Pos dan Jasa Pengiriman lainnya lebih kecil dibandingkan dengan target yang diperkirakan sebelumnya. Meskipun pencapaian fisiknya hanya mencapai 70%, namun pada kenyataannya bahwa hubungan koordinasi dengan instansi/lembaga baik Pusat maupun Kab/Kota tetap terjalin karena sarana media sosial (medsos) seperti WA, Instagram dsb dapat dijadikan sarana komunikasi yang lebih efektif.

###### b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Secara fisik pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik diwujudkan dalam bentuk belanja jasa telepon, pulsa sms center, belanja jasa air, listrik, Penambahan gardu/daya listrik/kapasitas jaringan dan belanja hosting website Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan tingkat capaian 100%.. Ketepatan dalam memperkirakan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap tahunnya menjadi faktor utama pencapaian maksimal ini.

###### c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa administrasi keuangan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium Pengelola Keuangan, Manajemen Aset dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap bulannya dengan tingkat capaian 100%. Dampak positif dari kegiatan ini yaitu adanya motivasi yang tinggi yang mampu mendorong tingkat kinerja pengelola keuangan, manajemen asset, dan PPK. Hal ini terlihat dari kelancaran pelayanan dalam urusan keuangan, penataan asset, dan pengadaan barang/jasa.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilaksanakan dengan pembayaran honorarium tenaga cleaning service dan penjaga malam sebanyak 6 orang selama 1 tahun dengan tingkat capaian 100%. Kondisi lingkungan Kantor Bakesbangpoldagri NTB yang tetap bersih meskipun tengah dilakukan pekerjaan pembangunan kantor merupakan bukti nyata bahwa para tenaga cleaning service telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu pula dengan tenaga pengamanan telah bekerja dengan baik yang dibuktikan dengan kondisi kantor yang selalu aman selama kurung waktu 1 tahun (2016).

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menyiapkan alat-alat tulis yang dibutuhkan secara internal organisasi dalam rangka mendukung kelancaran dan pencapaian pelayanan secara optimal. Kebutuhan ATK selama 1 tahun telah didistribusikan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ke seluruh Bidang dengan capaian realisasi mencapai 100%.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan dengan mencetak blanko SPPD, BKU, SKT, SPJ Keuangan, dan penggandaan Perundang-undangan/Peraturan. Kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun dapat terpenuhi 100%.

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa pelayanan informasi kepada masyarakat dengan membuat iklan video, spanduk, Baliho dan belanja surat kabar/majalah. Kebutuhan akan bahan bacaan dan informasi selama 1 tahun dapat terpenuhi 100%.

h. Penyediaan makanan dan minuman

Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yaitu belanja makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan tamu. Rapat-rapat yang dibiayai melalui kegiatan ini adalah rapat yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi bersama instansi/lembaga lainnya yang pelaksanaannya

di Kantor Bakesbangpoldagri NTB, Jl. Pendidikan Nomor 2 Mataram. realisasi fisik mencapai 100%

i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah ditujukan untuk mendukung biaya pejalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi dan/atau menghadiri rapat-rapat ke luar Daerah Provinsi NTB. Realisasi fisik mencapai 100%.

j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditujukan untuk mendukung biaya dalam rangka rapat koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan serta monitoring dan evaluasi ke Kab/Kota se NTB. Realisasi fisik mencapai 100%.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- ***Rapat Kerja I dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan Tahun 2016 dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Tahun 2017 antara Kesbangpoldagri Prov. NTB dengan Kesbangpol Kab/Kota se-NTB.***

Rapat kerja ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan di bidang keatuan bangsa dan politik dalam negeri antara Provinsi NTB dengan kabupaten/kota se-NTB Tahun 2016 sehingga tercipta persamaan persepsi dalam pencapaian tujuan.

Rapat kerja ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 20 Juli 2016 di Hotel Idoop Jl. Swaramahardika Mataram dan dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan pejabat lingkup Bakesbangpoldagri Provinsi dan Kab/Kota. Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB membuka acara secara resmi dan sekaligus menyampaikan materi. Hadir sebagai narasumber lainnya yaitu Kepala BPKAD Provinsi NTB serta Kepala-Kepala Bidang Teknis di Bakesbangpoldagri Prov. NTB.

Rapat Kerja berlangsung lancar dan tertib sesuai rencana dengan menghasilkan sebagai berikut :

1. Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen PUM kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terkait dengan perintah untuk tetap dialokasikannya anggaran untuk Bakesbangpol seluruh Indonesia sampai ada keputusan yang pasti tentang status Kesbangpol.

2. Memfasilitasi kegiatan dan operasional LVRI
3. Bakesbangpoldagri Prov NTB agar memberikan informasi kepada Bakesbangpol Kabupaten/Kota tentang keberadaan Ormas dan lokasinya.
4. Kegiatan Rakor seperti ini agar tetap terus dilakukan untuk menciptakan sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan antara prov dan kabupaten/kota
5. Supaya terdapat persamaan dalam implementasi program/kegiatan serta penganggaran, sebaiknya dihadirkan pula dari unsur Bappeda dan BPKAD dari Kab/Kota
6. Lokasi Kegiatan Rakor supaya di gilir ke masing-masing Kabupaten/Kota

- ***Rapat Kerja (Raker) II dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Tahun 2017***

Raker II yang dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 30 November 2016 di Puri Indah Hotel. dihadiri 30 peserta yaitu seluruh Kepala Badan/Kantor Bakesbangpoldagri Kab/Kota se- Prov. NTB kecuali Kota Bima ditambah dengan peserta dari Provinsi.

Acara Raker dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB. Pada sambutannya Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh peserta rapat untuk tetap optimal bekerja didalam keterbatasan anggaran yang tersedia. Bakesbangpoldagri selaku salah satu institusi yang mengawal pencapaian Misi Ke-3 RPJMD yaitu Melanjutkan ikhtiar Reformasi Birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan **memantapkan stabilitas keamanan**, berperan sangat strategis dalam mencegah, menjaga serta menciptakan kondisi daerah yang aman dan nyaman. Beranjak dari kondisi tersebut selayaknya harus mendapatkan porsi anggaran yang sebanding, terutama dalam mendukung program-program kegiatan yang mendukung pencapaian misi maupun indikator yang dimaksud diatas. Oleh kerena itu Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB mengimbau agar kita selaku aparat untuk jeli dan peka untuk melihat perkembangan yang ada. Berkaryalah

dalam program dan kegiatan yang dapat menangkal situasi-situasi negatif yang terjadi, cegah dini dan deteksi dini terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi harus dimiliki sehingga bintik munculnya konflik dapat ditekan. Acara Raker dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para kepala bidang teknis lingkup Bakesbangpoldagri Prov. NTB dan diskusi. Secara keseluruhan pelaksanaan Raker berlangsung tertib dan lancar. Selanjutnya Raker diakhiri dengan penandatanganan Rekomendasi Hasil Raker untuk ditindaklanjuti di institusi masing-masing sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasarkan peraturan perundungan adalah dasar atau pondasi yang fundamental dalam upaya pembangunan bangsa dan Negara Indoonesia secara keseluruhan belum sepenuhnya dipahami oleh pengambil kebijakan sehingga program dan kegiatan tidak mendapat dukungan anggaran maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan-pimpinan daerah di kab/kota yang diinisiasi oleh Bakesbangpoldagri NTB;
2. Untuk meningkatkan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka bakesbangpoldagri Provinsi NTB wajib senantiasa menjalin koordinasi dengan kesbangpoldagri kab/kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota;
3. Untuk memberikan honorarium/kegiatan bagi anggota Forkopimda Kab/Kota dengan nilai yang sama atau tidak terlalu jauh berbeda antara satu kab/kota dengan kab/kota lainnya, perlu satu kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang dipedomani dalam penyusunan anggaran di kab/kota dan tetap difasilitasi oleh Kesbangpoldagri Kab/Kota;
4. Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dan Bakesbangpoldagri Kab/Kota berkoordinasi untuk melakukan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa khusunya di kawasan-kawasan strategis;
5. Dalam menentukan lokasi pelaksanaan satu program atau kegiatan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB agar lebih mengutamakan Kab/Kota

- yang belum mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kab/Kota untuk program atau kegiatan yang sama;
6. Rekomendasi Bakesbangpoldagri Provinsi NTB untuk Ormas disampaikan kepada Bakesbangpoldagri Kab/Kota dimana ormas berdomisili;
  7. Bakesbangpoldagri Kab/Kota segera membuat Database parpol sebagai acuan Database Parpol dan Ormas Provinsi NTB ;
  8. Bakesbangpoldagri Provinsi NTB memberikan pendampingan pada tahap evaluasi Perda terkait dengan APBD Kab/Kota yang akan diverifikasi oleh Tim Evaluasi Provinsi sehingga program-program Bakesbangpol dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

## A.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

### a. Pembangunan gedung kantor

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor merupakan belanja modal berupa pembangunan gedung kantor tahap II. Adapun posisi bangunan terletak di bagian belakang atau pada sisi utara. Proses pengadaan dilakukan dengan Lelang umum melalui ULPBjP Provinsi NTB yang dimenangkan oleh CV. Mitra Rinjani. Realisasi fisik mencapai 100%.

### b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kebutuhan prasarana kantorselama 1 tahun dapat terpenuhi (100%) melalui kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor seperti terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Prasarana kantor yang diadakan tahun 2016

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1.	meja kerja	5	Unit
2.	Podium	1	Buah
3.	Karpet Sajadah	8	Buah
4.	Gorden/Tirai	1	Paket
5.	AC	3	Unit
6.	Komputer PC	2	Unit
7.	Laptop/Notebook	3	Unit
8.	Printer	3	Unit
9.	Jaringan Internet	1	Paket
10.	Meja Biro	1	Buah
11.	Meja ½ Biro	4	Buah
12.	Lemari Arsip	3	Buah
13.	Filling Cabinet	3	Buah

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
14.	CCTV	1	Paket
15.	Camera	1	Buah
16.	Handycam	1	Buah
17.	LCD Projector	2	Buah

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor dilaksanakan dengan melakukan pemasangan teralis jendela dan renovasi interior kantor(belanja aset tetap). Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan ini dapat memenuhi kebutuhan dalam upaya meningkatkan daya dukung sarana kantor terhadap kinerja organisasi selama 1 tahun (100%).

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dilaksanakan dengan melakukan perawatan terhadap 31 unit kendaraan bermotor, terdiri dari 23 unit kendaraan roda dua dan 8 unit kendaraan roda empat. Adapun jenis pekerjaan meliputi pergantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas dan pelumas, sewa kendaraan untuk pengangkutan barang-barang dari Kantor Sementara di Jalan Bung Hatta Mataram ke Kantor yang baru dibangun di Jalan Pendidikan No. 2 Mataram, Sewa kendaraan untuk kegiatan MTQ.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dilaksanakan dengan melakukan belanja aset tetap kantor antara lain teralis jendela dan renovasi interior kantor. Manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kondisi keamanan kantor dan terciptanya kondisi yang nyaman untuk bekerja.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dilaksanakan dengan belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor berupa AC, Laptop dan sebagainya.

### A.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal

-

b. Peningkatan mental dan fisik aparatur

Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur dilaksanakan melalui belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam dan belanja makan minum kegiatan imtaq.

**A.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini diperuntukkan untuk membayar honorarium Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Tahun 2015, Laporan Tahunan 2015 dan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan capaian 100%.

b. Penyusunan rencana kerja SKPD

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini berupa Dokumen RKA 2017& RKAP 2016, DPA 2017 & DPPA 2016, Rencana Kinerja/Renja 2017 dan Website Kesbangpoldagri NTB. Semua anggota Tim Penyusun mendapatkan insentif berupa honorarium.

**A.5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

a. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajement Asset/barang Milik Daerah yaitu meningkatnya kemampuan manajerial bagi Pengurus dan Penyimpang Barang.

**B. BIDANG PENGKAJIAN MASALAH STRATEGIS DAN PENANGANAN KONFLIK**

Terdapat ....program dan...kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bidang PMS dan PK sbb:

**B.1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

a. Pengendalian keamanan lingkungan

Beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan ini sbb::

- Peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM dalam bentuk pembayaran honorarium selama 10 (sepuluh) bulan. Tim FKDM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No. 300-242 tahun 2016 dimaksudkan untuk:
  - Melakukan upaya preventif terhadap terjadinya konflik di daerah

- Memberi informasi kepada pimpinan sebagai dasar untuk mengambil langkah atau kebijakan berikutnya
- Peningkatan kapasitas Tim Fasilitasi Pembinaan dan penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat serta Sekretariat. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur No. 300-244 tanggal 25 Pebruari tahun 2016 dan Perubahan No. 300-877 tanggal 2 November 2016 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Berdampak Luas, sistemik, Sensitif dan strategis di Prov NTB.

Adapun tugas Tim sebagai berikut :

- melakukan penggalangan dan sosialisasi yang terstruktur dalam menetralisir anasir-anasir yang berpotensi melakukan kegiatan yang berdampak luas, sistemik, sensitive dan strategis bagi timbulnya instabilitas
- Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat memicu tindakan terorisme, radikalisme dan kejahatan transnasional
- Mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya potensi disharmonisasi sosial
- Meminimalisir dan memperkecil ruang lingkup wilayah dan kelompok penyebaran ajaran-ajaran yang dapat menimbulkan kerusuhan sosial yang meluas
- Merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan terkait dengan stabilitas darah.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden Cq. Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur NTB

Diantara kerja nyata yang dilakukan Tim ini yaitu setiap bulan melakukan koordinasi guna membahas isu-isu yang berkembang baik di level nasional maupun internasional dan lebih khusus lagi yaitu membahas/menangkal isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat NTB agar segera diinisiasi penyelesaian supaya tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar atau mengantisipasi

supaya isu yang berkembang di luar wilayah NTB tidak mengganggu stabilitas keamanan di wilayah NTB.

Fasilitasi terhadap Tim ini telah terealisasi kepada 19 (sembilan belas) orang anggota tim selama 12 bulan.

- Peningkatan kapasitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS). Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No. 300-243 tanggal 25 Februari 2016 ini memiliki tugas sbb:
  - Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PKS
  - Menyusun rencana aksi terpadu PKS di daerah dengan berpedoman pada Aksi Terpadu Tingkat Pusat PKS tahun 2016
  - Melaksanaan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam negeri disebabkan konflik sosial dan terorisme
  - Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam negeri secara terus menerus terhadap kemungkinan terjadinya berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik
  - Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme serta melakukan klarifikasi, konfirmasi koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan
  - Mengambil tindakan cepat, tepat dan tegas dalam mengatasi permasalahan di luar kemampuan dan kewenangan daerah
  - Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik dan terorisme.
  - Melaporkan hasil penanganan konflik sosial kepada Menteri dalam negeri RI dan Gubernur NTB secara berkala
- Tim Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan di Kabupaten/Kota.

Tim Jejaring di bentuk berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No. 300-241 tanggal 25 Pebruari 2016. Tim ini terdiri dari unsur Kesbangpol Kabupaten/Kota, Badan Intelejen Daerah, Polda, Korem, Polres, Kodim, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, dll yang berjumlah 70 orang.

Tim ini bertugas membantu tugas-tugas anggota intelejen daerah dan FKDM dalam mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelejen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala/peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas baik nasional maupun regional.

- Rakorda Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),  
Maksud dan tujuan dari Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2016 ini dilaksanakan dalam upaya memantapkan tugas dan fungsi FKDM melalui deteksi dini dan cegah dini gangguan kantrantibmas di wilayah NTB.

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2016 dilaksanakan selama 2 (Dua) hari pada tanggal 25 sd 26 Mei 2015 di Legi Jl. Sriwijaya No. 81 Mataram yang diikuti oleh Pejabat Kesbangpoldagri Kab/Kota se NTB, Ketua dan Sekretaris FKDM Kab/Kota se NTB serta Pengurus FKDM Provinsi sebanyak 70 (tujuh puluh) Orang Peserta, dengan rincian Pengurus FKDM Provinsi NTB (30Orang), Pengurus FKDM Kab/Kota se NTB (20Orang), Pejabat Bakesbangpoldagri Kab/Kota se NTB (20Orang).

Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi NTB dan dilanjutkan penyampaian materi oleh beberapa Narasumber yaitu : Kabinda NTB dengan materi berjudul “Pemetaan Potensi Kerawanan dan Upaya Pencegahan Konflik Sosial, Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan materi berjudul “Peran Kesbangpoldagri Dalam Menciptakan Stabilitas di Daerah”. Ketua FKDM NTB dengan materi berjudul “Evaluasi dan Penguatan Fungsi FKDM”

Setelah selesai pemaparan dari masing-masing Narasumber acara dilanjutkan dengan diskusi.Karena materi yang disampaikan sangat menarik dan sering ditemukan dilapangan, maka diskusi berlangsung aktif dan dinamis.Secara keseluruhan pelaksanaan Kegiat Rapat Koordinasi Daerah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2016 berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Mencermati laporan dan masukan dari Kab/Kota terkait perkembangan situasi dan kondisi Ketertiban dan Keamanan terakhir di Kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari peserta kabupaten/kota, menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Gubernur mengadakan rapat pimpinan daerah (Provinsi/Kab/Kota) untuk pemberdayaan FKDM dalam rangka deteksi dan pencegahan dini konflik dengan anggaran yang memadai
- b. Dalam rangka mengantisipasi ***“Indonesia Darurat Narkoba, Radikalisme, kekerasan seksual terhadap anak, Miras”*** maka perlu peningkatan pengawasan khusus dari aparat keamanan, masyarakat dan pemerintah.
- c. Melengkapi sarana prasarana FKDM dan meningkatkan koordinasi antara pengurus FKDM dan stakeholder untuk menyerap informasi dalam upaya deteksi dini dan cegah dini
- d. Pemerintah, aparat keamanan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan ronda malam
- e. Penyelesaian konflik social yang berlatarbelakang agrarian/sumber daya alam dan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan *Coorporate Social Respocibility (CSR)*
- f. Pemberdayaan Tokoh masyarakat dalam memantapkan dan memelihara Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
- g. Dalam penyelesaian konflik digunakan mediasi dan jika tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka digunakan jalur Litigasi (hukum)

- h. Memutus mata rantai pencurian hewan ternak, curanmor antar daerah dan antar pulau di Provinsi NTB
- Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Konflik Sosial di Kalangan Pemuda, Pelajar dan Ormas di Kabupaten Lombok Timur.  
Kegiatan FGD ini dimaksudkan yaitu untuk mencapai persamaan persepsi, Visi dan misi dalam menangkal, mencegah dan sekaligus mengeliminir dampak sedini mungkin dari setiap kejadian guna terciptanya stabilitas daerah dan tetap terpeliharanya kesatuan bangsa. Serta memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang deteksi dini dan cegah dini terhadap terhadap persoalan yang akan timbul lingkungan tempat tinggal khususnya serta di wilayah NTB umumnya.  
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 13 April 2016 di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti oleh 60 orang peserta terdiri dari : Unsur pemuda (20 orang), Unsur pelajar (20 orang), dan Unsur ormas diwakili (20 orang)

Pada kegiatan tersebut menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber yang terdiri dari :

- Dr. H.M.Natsir, SH.,M.Hum selaku Ketua FKDM Provinsi NTB dengan materi berjudul "Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam Penyelesaian Konflik"
- M. Hutagalung Kabag OPS Polres Lombok Timur dengan materi berjudul "Pencegahan Konflik "
- Sudirman, S.Sos Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur dengan materi berjudul Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur "

Dari FGD tersebut dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Membangun kebersamaan dan silaturahmi serta solidaritas adalah perwujudan rasa persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa
- Dengan FGD dapat membangun budaya dialogis dan kebebasan berpendapat untuk memecahkan setiap permasalahan sosial kemasyarakatan serta mendorong partisipasi masyarakat yang demokratis, sehat dan martabat

- FGD adalah sebagai salah satu alat atau wadah silaturrahmi untuk membangun peran aktif Kominda, FKDM, FKUB dan Forum lainnya dalam membuat kerangka berpikir dalam meningkatkan pengamanan wilayah

Secara keseluruhan realisasi anggaran untuk mendukung program tersebut adalah sebesar Rp. 3.954.343.200,- (99,15%) dari pagu Rp. 3.988.130.000,- dan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran telah dikembalikan ke kas daerah

## B.2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terdapat satu kegiatan pada program ini yaitu:

- a. Pencegahan, penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat

Bentuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- **Fasilitasi/pengerahan personil terlatih dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden, dan pemulihan/ penghentian konflik sosial;**

Secara prosedur tetap (Protap) pengamanan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI ke daerah-daerah adalah menjadi kewenangan TNI dan POLRI. Akan tetapi apabila dalam pelaksanaan pengamanan tersebut terindikasi akan membutuhkan belanja/ pengeluaran yang lebih besar maka pihak TNI dan POLRI dapat mengajukan proposal untuk mendapat tambahan anggaran dari Bakesbangpoldagri sesuai yang dibutuhkan. Pada TA. 2016 pihak TNI dan POLRI melakukan pengajuan anggaran Fasilitasi/ pengerahan personil terlatih dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke NTB sebesar Rp. 549. 638.700,- dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 1 Milyar.

Disamping anggaran untuk Fasilitasi/ pengerahan personil terlatih dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI ke NTB, pada program di atas terdapat juga anggaran hibah/bantuan kepada kelompok masyarakat berupa pengadaan kendaraan operasional untuk Pamswakarsa Rajawali Sejati yang berlokasi di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur berupa Kendaraan roda

empat (mobil mini bus). Secara keseluruhan realisasi anggaran untuk program tersebut adalah sebesar Rp. 747.608.700,- (68,51%), dari pagu Rp. 1.091.220.000,- dan realisasi fisik 97,99%. Anggaran yang tidak terealisasi telah dikembalikan ke Kas Daerah.

## C. BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

### C.1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan:

Berbagai kondisi riil yang terjadi di *Indonesia* saat ini yang menjadi dasar pemikiran perlunya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan adalah sebagai berikut :

- Penurunan rasa nasionalisme dan lemahnya rasa kebangsaan para komponen bangsa, termasuk anak didik kita sehingga ada yang tidak mampu menyebutkan teks Pancasila secara utuh dan benar
- Rasa apriori terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga banyak para siswa lebih mengidolakan tokoh fiksi dan selebritis dari pada tokoh nasional bangsa ini
- Maraknya perkelahian antar pemuda, pelajar, mahasiswa yang dipicu oleh masalah-masalah sepele
- Dekadensi moral yang disebabkan pengaruh globalisasi, dll.

Ini semua merupakan bentuk dari Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang ada didepan mata kita. Oleh karena itu peningkatan pemahaman akan wawasan kebangsaan dan penguatan rasa nasionalisme perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya, termasuk kepada para pendidik sebagai ujung tombak yang memberi kontribusi besar dalam pembentukan karakter bangsa. Oleh sebab itu, maka Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Program Wawasan Kebangsaan melaksanakan 3 kegiatan, dan sebagai berikut :

#### C.1.1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama

Beberapa hal yang dilakukan pada kegiatan ini sbb:

1. Pembayaran honorarium Pengurus Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM) Provinsi NTB sebanyak 20 orang.
2. Rapat Koordinasi (Rakor) dan Silaturahmi Toga, Toma, Todat dan FKUB dalam rangka peningkatan kehidupan beragama.  
Kegiatan Rakor dan silaturahmi Toga, Toma Todat dan FKUB dalam rangka peningkatan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara

telah terselenggara atas kerjasama Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dengan Bakesbangpol Linmas Kabupaten Dompu pada tanggal 24 – 25Mei 2016 di Hotel TursinaDompu yang diikuti oleh 60 orang peserta terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Generasi Muda dan FKUB se-Kabupaten Dompu.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB yang dilanjutkan penyampaian materi atau pencerahan dari narasumber Kapolres Dompu, Ketua FKUB Prov NTB, Ketua FPK Prov NTB dan Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Dompu. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta kepada seluruh narasumber. Secara keseluruhan acara berlangsung tertib , dinamis dan lancar.

#### *C.1.2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat*

Beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini sbb:

##### 1. Rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Rakor Forum Pembauran Kebangsaan dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 24s/d 25Februari 2016 bertempat di Hotel Pratama Mataram. Acara Rakor diikuti 35 orang peserta dari unsur Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi NTB dan instansi terkait. Acara Rakor di buka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Narasumber yang terdiri dari Danrem 162/Wira Bhakti, Ketua LVRI NTB, Dosen IAIN Mataram dan Ketua FPK Prov. NTB.

Dari Rakor tersebut dihasilkan beberapa rumusan sbb:

- a. FPK Provinsi NTB menolak secara tegas terhadap legalitas dan Penyebaran paham Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT) di Wilayah Provinsi Nusa Tenggar Barat dan diminta kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membuat Peraturan Bupati maupun Peraturan Walikota dan kemudia dilanjutkan dengan membuat Peraturan Daerah terkait LGBT tersebut.
- b. Dalam menumbuhkembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional perlu kiranya Pemerintah Provinsi NTB mewajibkan proses pembelajaran tentang Wawasan

- Kebangsaan yang direkomendasikan agar dapat masuk dalam kurikulum Pendidikan.
- c. Diminta Pemerintah Provinsi NTB agar dapat merevitalisasi fungsi dan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan media lainnya untuk memberikan secara profesional dan berimbang antara keberhasilan pembangunan di Provinsi NTB dalam segala bidang dengan berita-berita yang berdampak negatif di masyarakat.
2. Orientasi Bela Negara bagi Aparatur Sipil/Generasi Muda se-Provinsi NTB.

Kegiatan Orientasi Bela Negara bagi Aparatur Sipil/Generasi Muda se – Provinsi NTB dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara/komponen bangsa, khususnya bagi Aparatur Sipil/Generasi Muda guna mewujudkan ketahanan bangsa di dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mendorong tumbuhnya rasa kesadaran bela negara bagi Aparatur Sipil/Generasi Muda ditengah-tengah kemajuan teknologi dan peradaban manusia di era globalisasi ini sehingga tidak tergerus karakternya sebagai anak bangsa dan tetap menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat berbangsadan bernegara yang selalu memiliki jati diri dan karakter sebagai anak Indonesia.

Kegiatan ini telah dilangsungkan selama dua hari yaitu dari tanggal 9 s.d 10 Agustus 2016 bertempat di Fave Hotel Mataram. Kegiatan Orientasi Bela Negara bagi Aparatur Sipil/Generasi Muda se – Prov. NTB ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh beberapa orang narasumber yang merupakan perwakilan dari DANREM 162/Wira Bhakti, Kapolda NTB, Ketua Legiun Veteran NTB, Kepala Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan (PNNK) Bakesbangpoldagri Provinsi NTB.

Setelah penyampaian materi acara dilanjutkan dengan diskusi. Acara diskusi berlangsung aktif dan dinamis, serta di akhir kegiatan disimpulkan pemuda harus dapat mengembalikan masa depan bangsa

yang dinantikan dalam perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara karena pemuda merupakan pewaris sejarah bangsa yang mempunyai kesempatan dan kemauan yang sangat tinggi serta memiliki peran setralnya dalam berbagai bidang seperti :

- a. Pemuda harus bersatu sebagai agen perubahan,
- b. Pemuda harus bersatu dalam kepentingan bersama,
- c. Mengembalikan semangat Nasionalisme dan Patriotisme di kalangan generasi muda, tanpa harus meninggalkan jatidiri bangsa,
- d. Pemuda menjadi Aktor untuk mewujudkan Demokrasi Politik dan ekonomi yang sebenarnya,
- e. Pemuda harus dapat memainkan perannya sebagai Generasi Penerus Bangsa.

Melihat kondisi dan antusias peserta diharapkan agar pada tahun-tahun berikutnya pelaksanaan orientasi bela negara agar tetap diprogramkan dengan volume kegiatan yang lebih besar lagi.

### 3. Pengembangan Lab. Sosial “Kampung Madani”

Pengembangan Lab Sosial “Kampung Madani” yang pada 2015 masih pada tahap penjajakan atau survey, memasuki tahap penyusunan peraturan pada 2016. Penyusunan peraturan terkait dengan “Kampung Madani” didasarkan pada kearifan lokal atau secara umum disebut awiq-awiq. Penyusunan peraturan ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu 3 (tiga) kali mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di Aula Bakesbangpoldagri Provinsi NTB bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dari masing-masing desa. Setelah draft peraturan masing-masing desa telah selesai, diadakan workshop di salah satu lokasi dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk melakukan koreksi terhadap draft peraturan yang sudah disusun.

Setelah dilakukan koreksi terhadap draft peraturan tersebut, maka tahap akhir yaitu melaksanakan seminar yang diadakan di lesehan Green Asri Kel. Sayang-Sayang Rembiga Kota Mataram. Setelah pelaksanaan Seminar, dihasilkan 2 peraturan yaitu peraturan untuk Desa Kute dan

Peraturan untuk Desa Sesait.Pengembangan “Kampung Madani” pada 2016 masih terfokus pada dua desa tersebut.

Peraturan yang diputuskan melalui hasil FGD, dan workshop diberi judul “**Kitab Hukum Adat Majelis Krama Adat Wet Sesait**” untuk Desa Sesait dan “**Naskah Awiq-Awiq Kampung Madani**” untuk Desa Kuta”.

*C.1.3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa*  
Sub kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsasbb:

- a. Penyusunan Buku Biografi Tokoh-Tokoh Daerah NTB

Penyusunan Buku Biografi Tokoh-Tokoh Daerah NTB tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala teknis yaitu minimnya literatur yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penyusunan buku.

- b. *Training of Trainer* (ToT)Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi Tenaga Pendidik/Guru se Provinsi NTB  
Taining of Trainer (ToT)Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bagi Tenaga Pendidik/Guru se Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan pada tanggal 15s/d 16Nopember 2016 di Hotel Lombok Raya,Jl. Panca Usaha No. 11, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram. Peserta ToT sebanyak 50 orang terdiri dari Guru SD, SLTP, SLTA se Provinsi NTB.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sekaligus sebagai narasumber dengan materi berjudul ”Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik dalam Menanamkan Pemahaman 4 (empat) Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Setelah pembukaan dan penyampaian materi oleh Kepala Badan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber yang lain yaitu :

- KOREM 162/WB dengan materi berjudul “Memahami Nilai-Nilai 4 (empat) Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa”.

- BKD dan Diklat dengan materi berjudul “Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa bagi Aparatur Sipil Negara”.
- Institut agama Islam Negeri dengan Materi ”4 (Empat) Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Perekat Anak Bangsa di tengah-tengah situasi Perpolitikan Saat Ini”.
- PGRI Provinsi NTB dengan materi ”Penerapan dan Pemahaman Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Menghadapi Era Globalisasi Pada Anak Didik”.

Acara berlangsung tertib, aktif dan dinamis. Diskusi yang awalnya hanya dibuka 3 sesi, namun karena peserta cukup antusias menyampaikan saran, pendapat, pertanyaan serta sharing pengalaman sehingga acara diskusi berlangsung sampai beberapa sesi, terutama pada bagian pemaparan narasumber dari PGRI Provinsi NTB. Pada acara diskusi dan sharing pengalaman tersebut banyak dari peserta (pendidik) menyampaikan pengalaman langsung mereka dalam menghadapi berbagai karakter anak didiknya. Disamping itu pula banyak yang menyuarakan tentang kisah pilu para pendidik di era sekarang yang selalu berhadapan dengan HAM dan orang tua peserta didik yang terlalu mengagungkan HAM sehingga kejadian-kejadian kecil di sekolah dalam rangka pembinaan disiplin, dan pembentukan karakter anak didik seringkali dibenturkan dengan HAM, dan tidak jarang berujung pada urusan hukum.

Terhadap kondisi tersebut banyak menyarankan agar tidak hanya saat ini dilakukan TOT tersebut, tetapi harus terus dilakukan dengan peserta yang variatif termasuk dari kalangan orang tua peserta didik dengan tema peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa .

- c. Outbound bela negara bagi generasi muda dan atau pramuka
- Outbound bela negara telah dilaksanakan diTeratai Outbound Taman Wisata Alam Suranadi Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 1Desember 2016 yang diikuti oleh 75 orang peserta dari unsur aparatur sipil dan generasi muda.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan jiwa disiplin dan motivasi kerja bagi generasi muda dan/atau pramuka dalam memahai peraturan perundang-undangan, memahami kode etik, dan memahami seluruh tugas dan fungsi guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Tujuan yang diharapkan adalah peserta memupuk disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimanapun dan apapun. Disamping itu juga peserta diharapkan memahami wawasan kebangsaan serta nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kegiatan Outbound dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan di Bakesbangpoldagri Provinsi NTB kemudian dilanjutkan pemberian materi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan materi “Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga dan Memelihara Keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia” kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Narasumber dari KOREM 162/WB yang membeberikan materi dengan judul “Upaya Aparatur dalam pemahaman dan menanamkan rasa bela negara” lalu setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan Outbound yang di pandu langsung oleh Tim Teratai Outbound berupa permainan – permainan yang di dalamnya diselipkan materi tentang Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.

Pelaksanaan kegiatan Outbound terlaksana dengan tertib, lancar dan menyenangkan, hal tersebut terlihat dari antusiasme para peserta dalam melakukan berbagai permainan yang diselenggarakan oleh Tim Teratai Outbound. Kegiatan Outbound telah dilaksanakan dengan baik sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan serta permasalahan.

Selain kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan diatas, Bidang PNNK juga melaksanakan kegiatan melalui pendanaan non APBD yang dirinci berdasarkan 2 Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bidang Wawasan Kebangsaan sebagaimana termuat dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Kegiatan pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa

No	Kegiatan		
	Tanggal	Perihal	Acara
1	2	3	4
1	24 s/d 25/2/2016	Rakor dan Silaturahmi FPK NTB	Pemantapan Nilai-Nilai Kebersamaan antar etnis dalam upaya menjaga kondusifitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di daerah, Tempat kegiatan, Hotel Pratama Mataram, Narasumber 5 org. dan jumlah peserta 35 Org. Sumber dana APBD.
2	8/3/2016	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi komonitas masyarakat berbasis keagamaan	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi komonitas masyarakat berbasis keagamaan tempat kegiatan Ponpes Al Halimy Sesele Gunung Sari Lobar jumlah peserta 150 rang, narasumber 4 org. Peserta Santriawan/santriwati, pelajar, pramuka, pemuda, Ormas Sumber Dana PUSAT
3	10 s/d 11/3/2016	Dialog Pencegahan Pengaruh Idiologi lain	Dialog Pencegahan Idiologi lain terhadap nilai-nilai idiologi pancasila, peserta dari Tomas, Toga, Todat, Mahasiswa, LSM se- NTB jumlah peserta 100 orang, Narasumber 4 Orang tempat Hotel Lombok Raya, Sumber dana PUSAT
4	19/3/2016	Pembentukan Kampung Madani	Focus Group Discussion (FGD) Kampung Madani bertempat di Desa sesait, jumlah peserta 25 orang, Narasumber 3 orang, peserta Tomas, Toga, Todat, Toda Pompes, Ormas, sumber dana APBD
5	22 s/d 23/3/2016	Penguatan Karakter Bangsa	Penguatan Karakter Bangsa melalui Kearifan Lokal ( Local Wisdom), bertempat di Hotel Grand Legi, Jumlah Peserta 200 orang, diikuti oleh Tomas Toga, Todat, Toda, Ponpes, Ormas, LSM Sumber dana PUSAT
6	23/3/2016	Pembentukan Kampung Madani	Focus Group Discussion (FGD) Kampung Madani bertempat di Desa Doropeti Dompu, jumlah peserta 25 orang, Narasumber 3 orang, peserta Tomas, Toga, Todat, Toda Pompes, Ormas, sumber dana APBD
7	31/3/2016	Pembentukan Kampung Madani	Desa Kute Loteng, jumlah peserta 25 orang, Narasumber 3 orang, peserta Tomas, Toga, Todat, Toda Pompes, Ormas, sumber dana APBD

No	Kegiatan		
	Tanggal	Perihal	Acara
8	4-6/04/2014	Pembentukan Kampung Madani	Desa Bukit Damai KSB, jumlah peserta 25 orang, Narasumber 3 orang, peserta Tomas,Toga,Todat,Toda Pompes,Ormas, sumber dana APBD
9	24 s/d 25/5/2016	Rakor Tomas, Toga, Todat dan FKUB	Rapat Koordinasi dan silaturrahmi Toga,Toma,Todat,Toda bertempat di Hotel Tursina Dompu jumlah peserta 50 orang, Narasumber 5 orang Sumber dana APBD
10	26/5/2016	Rakor dan Silaturrahmi temu Tokoh lintas agama dan lintas Etnis di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kejatidirian,kesejahteraan dan kemartabatan sasak dalam menghadapi tantangan era global bertempat di Aula Handayani Dikpora Provinsi NTB, Narasumber 3 orang, jumlah peserta 50 orang dari Tomas,Todat,Toda,Ormas, sumber dana APBD.
11	1/6/2016	Rakor dan Silaturrahmi FPK	Rakor dan silaturrahmi Toga,Toma,Todat bertempat di aula Bakesbangpoldagri Prov.NTB narasumber 3 orang, jumlah peserta 50 orang dari Tomas,Toga,Todat,Toda,Pompes,Ormas Sumber dana APBD.
12	27/6/2016	Rakor dan Silaturrahmi Toga, Toma, Toda, Todat	Silaturrahmi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB dengan pengurus serta anggota FPK se-NTB bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Provinsi NTB,Narasumber 2 orang, peserta 40 orang dari anggota FPK Sumber dana APBD
13	23 s/d 24/8/2016	Rakor dan Silaturrahmi, Toga, Toma, Toda, Todat dan FKUB	Rapat Koordinasi dan silaturrahmi Toga,Toma,Toda,Todat bertempat di Hotel Camelia Kota Bima, narasumber 5 orang,jumlah peserta 50 orang berasal dari Toga,Toma,Todat,Toda, sumber dana APBD.
14	12/10/2016	Focus Group Discussion (FGD) Lab Sosial Kampung Madani Provinsi NTB	Penyuluhan, Pencegahan, penyalahgunaan, peredaran Narkoba dan Miras ( Pekat) di Provinsi NTB bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Prov.NTB, dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari Pemuda, Pelajar, Pramuka dan remaja masjid, narasumber 4 orang, sumber dana APBD

No	Kegiatan		
	Tanggal	Perihal	Acara
15	18/10/2016	Focus Group Discussion (FGD) Lab Sosial Kampung Madani Provinsi NTB	Focus Group Discussion (FGD) Lab Sosial Kampung Madani Provinsi NTB,peserta dari Toga, Tomas, Todat,Toda jumlah peserta 30 orang, narasumber 4 orang dan sumber dana APBD.
16	24/10/2016	Focus Group Discussion (FGD) Lab Sosial Kampung Madani Provinsi NTB	Focus Group Discussion (FGD) Lab Sosial Kampung Madani Provinsi NTB,peserta dari Toga, Tomas, Todat,Toda bertempatdi Aula Kesbangpoldagri Prov.NTB jumlah peserta 30 orang, narasumber 4 orang dan sumber dana APBD.
17	27/10/2016	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran Narkoba dan Miras (Pekat) di Provinsi NTB	Penyuluhan, Pencegahan, penyalahgunaan, peredaran Narkoba dan Miras ( Pekat) di Provinsi NTB bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Prov.NTB, dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari Pemuda, Pelajar, Pramuka dan remaja masjid, narasumber 4 orang, sumber dana APBD
18	7/11/2016	Laboratorium Sosial Kampung Madani	Workshop Lab. Sosial Kampung Madani Desa Kute Lombok Tengah bertempat di Dedy Home Stay Kute Loteng,Moderator 1 org, jumlah peserta 50 orang berasal dari Toga,Toma,Todat,Toda dan Sumber dana APBD
19	8 s/d 9/11/2016	Rakor dan Silaturrahmi Toga, Toma, Todat, Toda dan FKUB	Rapat Koordinasi dan Silaturrahmi Toga,Toma,Toda,Todat dan FKUB tempat di Hotel Golden Palace, jumlah peserta 50 orang berasal dari Toga,Toma,Toda,Todat, narasumber 4 orang sumber dana APBD
20	22/11/2016	Rapat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Rapat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Prov.NTB dengan jumlah peserta 40 orang, Narasumber 3 orang,sumber dana APBD
21	8/12/2016	Laboratorium SosialKampung Madani	Seminar Lab. Sosial Kampung Madani di Lesehan Grand Asri Lingkar Utara Sayang - sayang, Narasumber 1 org, Moderator 1 org, jumlah peserta 50

No	Kegiatan		
	Tanggal	Perihal	Acara
			orang berasal dari Toga,Toma,Todat dan Toda, Sumber dana APBD

## 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara

Kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara

No	Kegiatan		
	Tanggal	Perihal	Acara
1	1,2,3/3/16	Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peningkatan Kesadaran Bela Negara Guna Mencegah paham Radikal bagi Generasi Muda, Tempat kegiatan Hotel Grand Legi Mataram, Narasumber 4 orang, Jumlah Peserta 300 orang sumber sumber dana PUSAT
2	15/3/2016	Rapat kegiatan Tim Pokja Ops.Darat	Evaluasi Kegiatan Tim Kelompok Kerja Operasi Darat wilayah NTB tahun 2015 dan rencana kegiatan tahun 2016 bertempat di POLDA NTB peserta rapat 35 org. Narasumber 4 orang, sumber dana APBD.
3	28/4/2016	Rapat kegiatan Tim Pokja Ops.Darat	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), bertempat di Aula Kantor Bakesbangpoldagri Prov.NTB jumlah peserta 40 orang, Narasumber 2 orang, sumber dana APBD
4	9 s/d 10/8/2016	Orientasi Bela Negara bagi Aparat Sipil/Pemuda se-NTB	Peningkatan Rasa Wawasan Kebangsaan dalam Upaya membangun Karakter Bangsa bertempat di Hotel Idoop, Narasumber 4 orang, jumlah peserta 50 orang berasal dari Tokoh pemuda dan aparatur sipil sumber dana APBD
5	15/9/2016	Penyuluhan, Pencegahan, penyalahgunaan, peredaran Narkoba dan Miras ( Pekat) di Provinsi NTB	Penyuluhan, Pencegahan, penyalahgunaan, peredaran Narkoba dan Miras ( Pekat) di Provinsi NTB bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Prov.NTB, dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari Pemuda, Pelajar,

No	Kegiatan		
	Tanggal	Perihal	Acara
			Pramuka dan remaja masjid, narasumber 4 orang, sumber dana APBD
6	26/9/2016	Penyuluhan, Pencegahan, penyalahgunaan, peredaran Narkoba dan Miras ( Pekat) di Provinsi NTB	Penyuluhan, Pencegahan, penyalahgunaan, peredaran Narkoba dan Miras ( Pekat) di Provinsi NTB bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Prov.NTB, dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari Pemuda, Pelajar, Pramuka dan remaja masjid, narasumber 4 orang, sumber dana APBD
7	15 s/d 16/11/2016	Training oF Trainer (ToT) 4 (empat) Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara bagi tenaga Pendidik/Guru se NTB	Penerapan dan Pemahaman Nilai-Nilai yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara bertempat di Hotel Lombok Raya, Jumlah Peserta 50 Orang terdiri dari Tenaga Pendidik/Guru se NTB,jumlah Narasumber 5 Orang Sumber dana APBD.
8	1/12/2016	Outbound Bela Negara	Outbound wawasan dan bela negara bagi aparatur sipil dan/atau generasi muda bertempat di Teratai Outbound, Taman Wisata Alam Suranadi, Lombok Barat, narasumber 2 orang, jumlah peserta 75 orang yang berasal dari aparatur silpil dan generasi muda.

## D. BIDANG PENGEMBANGAN POLITIK DAN FASILITASI ORPOL/ORMAS

### D.1 Program Pendidikan Politik Masyarakat,

a. Penyuluhan kepada masyarakat, berupa:

- **Tim kajian dan analisa parameter Indeks Demokrasi Daerah,**

Merupakan tim yang dibentuk untuk mengkaji kontribusi dan permasalahan yang diberikan oleh masing-masing parameter pendukung IDI sehingga capaian IDI Provinsi NTB bisa meningkat secara signifikan setiap tahun. Adapun Tim kajian parameter IDI beranggotakan 11 orang

Pada 30 s/d 31 Maret 2016 telah dilakukan FGD Parameter IDI Daerah di Hotel Iddop yang dihadiri oleh 75 orang peserta dari unsur Orpol, Ormas, Lembaga Demokrasi dan unsur-unsur terkait lainnya. Pada FGD tersebut dihadirkan pembicara dari BPS selaku institusi yang berwenang menghitung ataupun mengolah data-data yang terkait dengan capaian IDI NTB, Wakil dari Bappeda dan dari Bakesbangpoldagri Prov NTB. Dari diskusi tersebut diperoleh gambaran bahwa rendahnya nilai IDI NTB dikarenakan adanya beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- Adanya tindakan warga masyarakat yang mengintimidasi kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga lain yang tidak sesuai dengan kebiasaan agama mereka (Pengrusakan tempat ibadah Ahmadiyah)
- Adanya PERDA/Keputusan Pemerintah Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota yang menghambat / mengharuskan setiap warga untuk bisa ngaji sebagai prasyarat Nikah
- Adanya PERDA tentang Jumat Khusuk yang tidak membolehkan kendaraan melewati jalan di depan Mesjid yang jemaah sedang melaksanakan sholat Jumat
- Sedikitnya produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD
- Adanya demo yang mengarah ke pengrusakan/anarkis
- Dll.
- **Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Prov NTB;**

Pokja IDI beranggotakan 55 orang yang berasal dari unsur-unsur terkait seperti: TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPS, Ormas, LSM, Wartawan, Bakesbangpoldagri, dll.

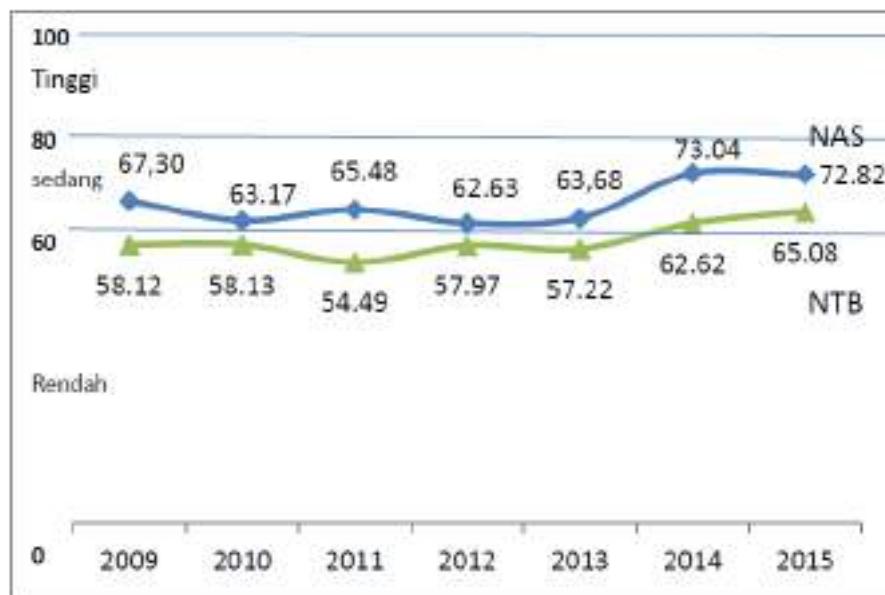
Pokja IDI dibentuk untuk mengawal agar IDI NTB meningkat secara signifikan setiap tahun.

IDI merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi. Alat ini sengaja dirancang dan sensitif dengan naik turun dinamika demokrasi. “Karena IDI disusun berdasarkan pada kejadian, sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi dari realitas yang ada”.

Perkembangan IDI NTB dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi.

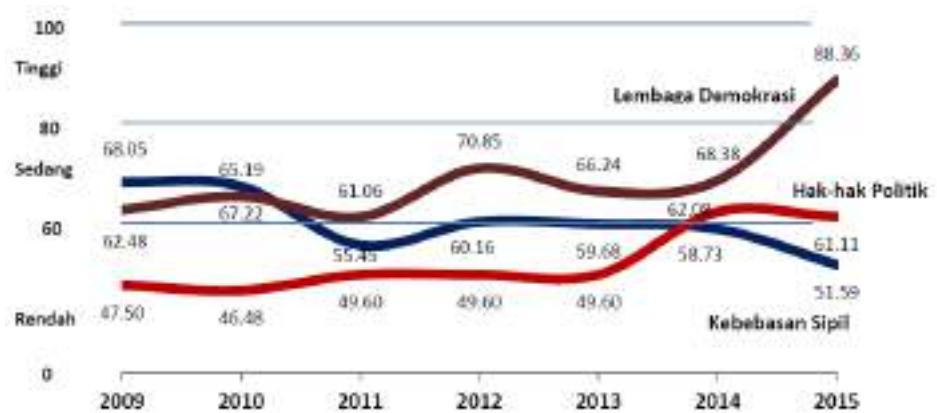
Tingkat demokrasi di NTB berdasarkan penghitungan indeks mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2015, sehingga NTB masuk dalam kategori sedang.

Grafik Perkembangan IDI NTB dan Nasional 2009-2015



Dibandingkan dengan capaian IDI tahun 2014 sebesar 62,62, maka capaian IDI NTB tahun 2015 naik 2,46 digit menjadi 65,08. Angka IDI merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata-rata nasional 80,30 dan NTB sebesar 51,59; aspek hak-hak politik dengan rata-rata nasional sebesar 70,63 dan NTB sebesar 61,11; dan aspek lembaga demokrasi dengan rata-rata nasional sebesar 66,87 dan NTB sebesar 88,36.

Grafik Perkembangan Indeks Aspek IDI NTB, 2009-2015



Kenaikan nilai IDI di NTB terutama didorong oleh kenaikan aspek hak-hak politik di tahun 2015 yang cukup signifikan. Praktis, nilai aspek ini beranjak ke posisi sedang, sebelumnya berada di nilai rendah.

Dari sisi indikator, ada 14 aspek yang mengalami kinerja baik. Misalnya, hak dipilih dan memilih, peran birokraji pemerintah daerah, peran partai politik. Berikutnya, kebebasan berpendapat dan lainnya sebagaimana dengan peroleh skor diatas 50. Sedangkan, indikator yang berada di bawah skor 50, diantaranya, persentase perempuan terpilih sebagai anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, aturan tertulis yang membatasi kegiatan keagamaan dan lain sebagaimana.“Pada prinsipnya, indeks demokrasi di NTB berada pada posisi sedang,”

**- Rapat Koordinasi Pokja IDI Prov NTB**

Rakor Pokja IDI telah dilaksanakan pada tanggal 17 dan 12 Nopember 2016 bertempat di Aula kantor Bakesbangpoldagri Prov NTB.

Pada rakor tersebut menghadirkan masing masing 50 orang peserta dengan narasumber kepala Bakesbangpoldagri dengan judul materi Potret IDI NTB dan Wakil dari BPS dengan judul Materi Upaya Meningkatkan IDI Prov. NTB.

Dari rakor tersebut dihasilkan kiat-kiat menaikan IDI NTB melalui hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah (Bupati/Walikota) terkait dengan PERDA yang diberlakukan di wilayahnya agar ditinjau kembali.
- Melakukan sosialisasi terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, agar tidak merugikan pihak lain (anarkis)
- Melakukan pendekatan secara personal maupun kelompok kepada masyarakat yang kontra terhadap ahmadiyah maupun kelompok ahmadiyah supaya bisa hidup penuh tenggang rasa dan bertoleransi.
- **Peningkatan kapasitas dan partisipasi Ormas/LSM dalam pembangunan;**

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan/pemantapan situasi dan kondisi sosial dan psikologi Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai langkah terobosan dalam penyiapan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses

pelaksanaan pembangunan dan sebagai upaya pemantapan sikap dan perilaku masyarakat dalam kerangka pengembangan budaya bernegara dan berbangsa.

Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu Untuk melanjutkan proses pendewasaan khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui perkembangan secara optimal sistem pembinaan Ormas/LSM yang baik, yang berkualitas dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Tanggal 25 dan 26 April 2016 bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Prov NTB dengan dihadiri oleh peserta dari unsur Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Bima

Kegiatan diawali dengan pembukaan secara resmi yang dilakukan oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bima yang dilanjutkan dengan penyampaian materi secara pleno dari 4 (empat) Narasumber yang terdiri dari :

1. Kepala Bakesbangpoldagri Prov NTB
2. Dr. Kaharuddin
3. Kanwil Pajak
4. Lalu Ahmad Kadar
5. Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB
6. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Ormas/LSM

Dari pertemuan tersebut diharapkan agar :

- Ormas dan LSM yang ada di NTB lebih mandiri. Hal ini dikarenakan adanya ormas/LSM yang dibangun hanya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah saja, tidak ada sasaran dan tujuan yang jelas
- Kelembagaan Ormas/LSM diperkuat sesuai dengan AD/ART serta Tujuan dan fungsinya
- **Sarasehan Orsospolbud;**

Kegiatan Sarasehan Organisasi Sosial politik dan Budaya (Orsospolbud) dimaksudkan sebagai upaya penyiapan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan dan

sebagai upaya pemantapan sikap dan perilaku masyarakat dalam kerangka pengembangan budaya bernegara dan berbangsa. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang konkret terhadap pemahaman yang keliru bidang budaya melalui penuangan ide secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sistem dialog dan diskusi yang baik, yang berkualitas serta bermoral dengan mengedepankan azas demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Sarasehan Organisasi Sosial politik dan Budaya telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Tanggal 15 dan 20 September 2016 di Aula Bakesbangpoldagri Prov NTB serta tanggal 18 Agustus 2016 di Hotel Idoop yang diikuti peserta dari unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan serta instansi terkait dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 50 orang.

Acara diawali dengan pembukaan sekalian penyampaian materi oleh Kepala Bakesbang Provinsi NTB yang dilanjutkan dengan penyampaian materi secara panel dari narasumber yang lain.

Dari pertemuan tersebut disepakati :

- Membangun komitmen bersama terhadap seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan program pemerintah
- Memupuk dan membangun karakter bangsa yang kuat dalam diri seluruh anak bangsa agar selalu setia dan siap tampil di depan dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI
- Menghadirkan negara di setiap penyelesaian masalah warga negara
- **Bimtek kelembagaan Orpol/Ormas dan LSM;**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah upaya pemantapan situasi dan kondisi sosial dan psikologi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai upaya penyiapan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan dan sebagai upaya pemantapan sikap dan perilaku masyarakat dalam kerangka pengembangan budaya bernegara dan berbangsa.

Sedangkan tujuannya adalah melanjutkan proses pendewasaan khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui perkembangan secara optimal sistem pembinaan Ormas/LSM yang baik, yang berkualitas dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Bimtek Kelembagaan Orpol/Ormas dan LSM telah dilaksanakan pada Tanggal 25 s.d 27 Februari 2016 bertempat di Hotel Golden Palace Jl. Sriwijaya No. 38 Mataram dengan peserta berasal dari unsur Partai Politik, Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se NTB berjumlah 50 orang.

Acara diawali dengan pembukaan sekalian penyampaian materi Kebijakan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilanjutkan secara pleno oleh narasumber yang lain yaitu:

1. Kepala Bakesbangpoldagri Prov NTB
2. Dr. Kaharuddin
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB ai Politik.
4. Dr. Kadri
5. Prof. Dr. Zainal Asikin, SH, SU

Pelaksanaan acara berlangsung aktif dan dinamis karena materi serta teknik penyampaian yang dilakukan narasumber cukup menarik dan merupakan bentuk nyata untuk diimplementasikan oleh Orpol dan Ormas dalam memanage/ mengelola keberlanjutan roda organisasi/ lembaganya. Karena inti dari pertemuan ini merupakan fasilitasi dalam bentuk bantuan keuangan, peserta yang hadir sangat antusias menyimak dan memperhatikan secara detail materi dan arahan yang disampaikan narasumber, sehingga pada saat acara diskusi/ tanya jawab peserta menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk bertanya secara detail tentang pengelolaan keuangan orpol/ormas. Kesimpulan dari pelaksanaan acara Bimtek Kelembagaan Orpol/Ormas dan LSM sangat bermanfaat untuk mendisiplinkan sistem administrasi maupun keuangan Orpol/Ormas dan LSM yang ada di Prov. NTB antara lain :

- Walaupun pendaftaran Ormas/LSM terpusat, seyogyanya setiap Ormas/LSM harus melaporkan keberadaannya ke pemerintah daerah setempat.
- Karena terbatasnya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah, diharapkan kepada Ormas/LSM membangun kemitraan terhadap sesama ormas/LSM dalam rangka keberlanjutan operasional organisasi
- Pengelolaan bantuan keuangan hendaknya dilakukan secara profesional sesuai amanat Permendagri No. 77 tahun 2014 tentang Pedoman tata cara penghitungan penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
- Diharapkan kedepannya kegiatan yang sama agar tetap dilaksanakan dengan menghadirkan peserta dari Ormas/LSM yang lain yang belum sempat dihadirkan pada pertemuan tahun ini.

Dukungan angaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 790.920.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2016, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 789.265.650,- (99,79%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%.

- b.** Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, berupa pemberian bantuan hibah keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik (parpol). Pemberian bantuan/hibah keuangan ini dilaksanakan atas dasar ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah yang diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pemberian bantuan/hibah keuangan partai politik ini dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi NTB selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atas rekomendasi berupa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Kepala Bidang Pengembangan Politik dan fasilitasi Orpol/Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Prov. NTB selaku SKPD yang memiliki fungsi dan kewenangan terhadap keberadaan/legalitas Parpoll dan ormas di Provinsi NTB. Pada TA. 2016 berdasarkan perolehan suara di

DPR terdapat 11 (sebelas) Partai Politik yang duduk di DPR dengan total bantuan keuangan sebesar Rp. 1.771.050.919 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah). Secara rinciparpol-parpol yang memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Nama-nama Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

	<b>Nama Parpol</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Perolehan Kursi</b>	<b>Nilai Per/Suara (Rp.)</b>	<b>Besarnya Bantuan Keuangan (Rp)</b>
1.	Partai NasDem	158,002	3	718.78	113,568,677.56
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	199,626	5	718.78	143,487,176.28
3.	Partai Keadilan Sejahtera	206,414	6	718.78	148,366,254.92
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	216,923	5	718.78	155,919,913.94
5.	Partai Golkar	373,056	11	718.78	268,145,191.68
6.	Partai Gerindra	265,887	8	718.78	191,114,257.86
7.	Partai Demokrat	305,669	8	718.78	219,708,763.82
8.	Partai Amanat Nasional	195,483	5	718.78	140,509,270.74
9.	Partai Persatuan Pembangunan	195,648	6	718.78	140,627,869.44
10.	Partai Hanura	207,550	5	718.78	149,182,789.00
11.	Partai Bulan Bintang	139,710	3	718.78	100,420,753.80
	Jumlah	2,463,968	65		1,771,050,919.04

Sedangkan bantuan kepada Badan/Lembaga/Organisasi untuk bidang penyelenggaraan Urusan Politik Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan Prov. NTB terdapat 54 Lembaga/Organisasi yang mendapat hibah keuangan dengan total biaya sebesar Rp. 1.626.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Daftar Badan/ Lembaga/ Organisasi Untuk Bidang Penyelenggaraan Urusan Politik Dalam Negeri terlampir (lampiran .. ).

Sama halnya seperti bantuan keuangan pada Parpol, bantuan keuangan kepada Lembaga/Organisasi juga dilaksanakan oleh Biro Keuangan

selaku SKPKD berdasarkan rekomendasi berupa verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Provinsi NTB.

Tabel 4.2 Ormas/LSM/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

<b>NO.</b>	<b>Nama Ormas</b>	<b>Alamat</b>	<b>Besarnya Bantuan Keuangan (Rp)</b>
1	Banjar KARYA SATRIA	Karang manggis Lingkungan Karang Lelede	Rp. 5.000.000
2	Banjar SRI ARTHA YADNYA	Jl. RA Kartini Gang Komodo 1 No. 8 Monjok Geria	Rp. 5.000.000
3	Banjar SUKA DUKA DHARMA YASA	RT. 07 Link. Kamasan Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang Mataram	Rp. 5.000.000
4	Banjar TARUNA KARYA JATI	Lingkungan Cemara Kel. Monjok Barat Kec. Selaparang	Rp. 5.000.000
5	Dharma Pertiwi KOORCAB NTB	Jl. Majapahit No. 10 A Mataram Kec. Kota Mataram	Rp. 5.000.000
6	Koordinator Wilayah NTB Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	Jl. Adi Sucipto No. 09 Rembiga Kec. Kota Mataram	Rp. 5.000.000
7	Banjar SUKA DUKA SERUNI	Jl. Cendana III Lingkungan Taman Seruni kel. Taman Sari	Rp. 7.000.000
8	Banjar SIDE KARYA	Jl. RA. Kartini Monjok Geria Kel. Monjok Kec. Selaparang	Rp. 7.000.000
9	Lembaga Bina Masyarakat untuk Pembangunan Nusa Tenggara Barat	Jl. Resani Batu Karu Utara Narmada Kec. Lobar	Rp. 7.000.000
10	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia	Jl. Lingkar Selatan BTN Perum Elit Blok G No. 26 Kec. Kota Mataram	Rp. 7.000.000
11	Pengurus Daerah Persatuan Wredatama	Jl. Pemuda No. 17 Mataram Kota Mataram	Rp. 7.000.000
12	LPK ZAKWAN TRAINING CENTER	RT. 02 RW. 01 Link. Pesanggarahan Kel. Kuang Kec. Taliwang Sumbawa Barat	Rp. 7.000.000
13	Lembaga Pemberdayaan dan Pelatihan Gerakan Aspirasi Masyarakat (LP2 Garam)	Desa Teko Kec. Pringgabaya Kab. Lotim	Rp. 7.500.000
14	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat	Jl. TGH. Nurudin No. 14 Desa Kekeri Kec. Gunung Sari	Rp. 7.500.000
15	Solidaritas Perempuan Mataram	Jl. Halmahera IIIB No. 14 Kel. Rembiga Kec. Selaparang	Rp. 7.500.000
16	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan EL YAMIN TERAMPIL	Jl. Ikhlah II No. 04 Dusun Setungkep Lingsar Kec. Keruak Kab. Lotim	Rp. 7.500.000
17	Lembaga Pengembangan Sumberdaya Kepemudaan LPSK NTB Maju	Bunsalak Kec. Praya Kab. Loteng	Rp. 7.500.000
18	Lembaga Swadaya Masyarakat Kembang Andar Nyawa Prov. NTB	Jl. Latsitanda Dusun Bual Desa Kec. Praya Kab. Loteng	Rp. 10.000.000
19	Yayasan Amphibi	Jl. TGH.M. Mutawali Bin Yahya Jerowaru Lotim	Rp. 10.000.000

20	Pemuda Pelopor Nasional PPN	Dusun Nyampe 2 Kec. Praya Timur Loteng	Rp. 10.000.000
21	Dewan Pimpinan Daerah Federal Serikat Pekerja logam Elektronik dan Mesin DPD FSP LEM	Jl. Raya Sikur Mt. Borok Kec. Sikur Kab. Lombok Timur	Rp. 10.000.000
22	Pam Suakarsa Buru Jejak BUMI GORA	Penggiling Desa Sukadana Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah	Rp. 10.000.000
23	Lembaga Karate-Do Indonesia Pengda NTB	Jl. Jend. A Yani No. 10X Batu Layar Lombok Barat	Rp. 10.000.000
24	Dewan Pimpinan Wilayah Hidayatullah NTB	Jl. Udayana Mataram Kec. Kota Mataram	Rp. 20.000.000
25	Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional NTB	Jl. Kesra Raya No. 30 Perumnas Kota Mataram Kec. Sekarbela Mataram	Rp. 20.000.000
26	Pimpinan Wilayah Pemuda NW NTB	Jl. Kaktus 1-3 Mataram Kec. Kota Mataram	Rp. 20.000.000
27	Lembaga Bintang Mentaram NTB	Jl. Bung Karno No. 30 Mataram Kec. Kota Mataram	Rp. 25.000.000
28	Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI	Jl. Veteran No. 10 Mataram	Rp. 25.000.000
29	Federasi Aero Sport Indonesia Paralayang	Mataram	Rp. 25.000.000
30	Gerakan Lembaga Asosiasi Perempuan Indonesia (API) NTB	Jl. Melur Kampung Melayu Kec. Ampenan Kota Mataram	Rp. 30.000.000
31	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) KHAIRU UMMAH	Jl. Hasanuddin No. 2 Selong Kab. Lotim	Rp. 30.000.000
32	Ikatan Istri Wakil Rakyat (ISWARA)	Jl. Udayana No. 11 Mataram	Rp. 30.000.000
33	Satgas Hamzanwadi	Jl. TGH. Umar Desa Kelayu Utara Lotim	Rp. 40.000.000
34	Pimpinan Wilayah NTB Gerakan Pemuda ANSOR	Jl. Pendidikan No. 6 Mataram	Rp. 50.000.000
35	DPP Paradah Indonesia NTB	Jl. Bung Hatta No. 5A Karang Jangkong Cakranegara Mataram	Rp. 50.000.000
36	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah	Ular Naga Bonder Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah	Rp. 50.000.000
37	PW Muslimat NW NTB	Jl. Langko No. 59 Mataram	Rp. 100.000.000
<b>Jumlah</b>		-	<b>Rp. 684.500.000</b>

Tabel 4.3. Badan/Lembaga Pemerintah Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016

Nama Badan	Alamat	Besarnya Bantuan Keuangan (Rp.)
2	3	6
Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB	Jl. Langko No. 17 Mataram	Rp. 739.863.000
Korem 162 Wira Bhakti	Jl. Lingkar Selatan Mataram	Rp. 1.650.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 2.389.863.000</b>

Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 175.531.700. Sampai dengan 31 Desember 2016, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 175.398.306 (99,92%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%.

c. Penyusunan Data Base Partai Politik, berupa Penyusunan Buku data base parpol berdasarkan hasil pemilu tahun 2014. Dari kegiatan ini telah tercetak ± 500 buku. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 27.200.000. Sampai dengan 31 Desember 2016 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 27.200.000 (100,00%) dan realisasi fisik 100,00%.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, berupa Monitoring keberadaan ormas/LSM. Bahwa dari hasil monev yang dilakukan masih banyak Ormas/LSM yang belum terdaftar baik di wilayah kerjanya maupun di pusat, disamping itu juga terdapat Ormas dan LSM yang pelaksanaan program dan kegiatannya tidak sesuai dengan AD/ART. Dukungan anggaran untuk memenuhi kegiatan ini yaitu sebesar Rp 202.113.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2016, capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 202.078.000,- (99,98%). Sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN KEUANGAN**

### **TAHUN ANGGARAN 2016**

Nilai APBD Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tahun 2016 sebesar Rp. 16.153.485.200 dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.5.082.878.200 dan Belanja Langsung(BL) Rp.11.070.607.000. Dengan adanya kebijakan perubahan anggaran di awal triwulan ketiga, alokasi dana untuk Bakesbangpoldagri Provinsi NTB yang tertuang dalam APBD-P Tahun 2016 sebesar Rp. 17.068.912.700 dengan rincian BTL Rp. 4.972.878.200 dan BL sebesar Rp. 12.096.034.000. Terlihat bahwa terjadi pengurangan pada BTL sebesar Rp. 110.000.000, sedang pada BL terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 1.025.427.000dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Pagu Anggaran Murni dan Perubahan TA. 2016

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA	16.153.485.200	17.068.912.700	915.427.500	5,67
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.082.878.200	4.972.878.200	(110.000.000)	(2,16)
5.1.1	Belanja Pegawai	5.082.878.200	4.972.878.200	(110.000.000)	(2,16)
5.2	BELANJA LANGSUNG	11.070.607.000	12.096.034.500	1.025.427.500	9,26
5.2.1	Belanja Pegawai	2.908.902.000	3.360.802.000	451.900.000	15,54
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.708.094.000	5.922.292.900	214.198.900	3,75
5.2.3	Belanja Modal	2.453.611.000	2.812.939.600	359.328.600	14,64
		(16.153.485.200)	(17.068.912.700)	(915.427.500)	5,67

Adapun realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam tabel dibawah ini.

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana Rp. (000)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.284.210.700</b>	<b>1.251.805.765</b>	<b>97,48</b>
	a. Penyediaan jasa surat menyurat	16.200.000	7.615.750	47,01
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114.459.212	102.056.266	89,16
	c. Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.352.000	62.352.000	100,00
	d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	213.120.000	213.120.000	100,00
	e. Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.635.000	47.635.000	100,00

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana Rp. (000)	Realisasi	
			Rp.	%
	f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.211.000	10.211.000	100,00
	g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	106.990.000	104.196.300	97,39
	h. Penyediaan makanan dan minuman	106.270.290	105.500.000	99,78
	i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	219.752.727	216.312.087	98,43
	j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	387.990.761	383.039.572	98,72
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.976.489.600</b>	<b>2.576.288.362</b>	<b>86,55</b>
	a. Pembangunan gedung kantor	2.248.561.000	1.854.313	82,47%
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	258.928.600	256.690.995	99,14
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	248.300.000	244.585.086	98,50
	d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	184.700.000	184.699.281	100
	e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.000.000	22.000.000	100
	f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	14.000.000	14.000.000	100
3.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	6.750.000	6.737.500	99,81
	a. Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0
	b. Peningkatan mental dan fisik aparatur	6.750.000	6.737.500	99,81
4.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>92.850.000</b>	<b>92.050.000</b>	<b>99,14</b>
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	39.750.000	39.750.000	100
	b. Penyusunan rencana kerja SKPD	53.100.000	52.300.000	98,49
5.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>22.750.000</b>	<b>21.850.000</b>	<b>96,04</b>
	a. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	22.750.000	21.850.000	96,04
6.	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>4.456.318.000</b>	<b>3.424.781.932</b>	<b>76,85</b>
	a. Pengendalian keamanan lingkungan	4.456.318.000	3.424.781.932	76,85
7.	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan</b>	<b>1.091.220.000</b>	<b>747.608.700</b>	<b>68,51</b>

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana Rp. (000)	Realisasi	
			Rp.	%
	<b>pencegahan tindak kriminal</b>			
	a. Pencegahan, penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat	1.091.220.000	747.608.700	68.51
8.	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	1.376.109.000	1.184.228.243	86.06
	a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	377.005.000	373.921.233	99,18
	b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	620.614.000	595.934.505	96.02
	c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	378.490.000	214.372.505	56.64
9.	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	61.760.500	59.703.604	96.67
	a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	61.760.500	59.703.604	96.67
10.	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>1.195.764.700</b>	<b>1.193.941.956</b>	<b>99,85</b>
	a. Penyuluhan kepada masyarakat.	790.920.000	789.265.650	99.79
	b. Penyelesaian perselisihan partai politik.	175.531.700	175.398.306	99.92
	c. Penyusunan data base partai politik.	27.200.000	27.200.000	100
	d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	202.113.000	202.078.000	99.98

## **BAB VI**

### **PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN**

#### **A. PERMASALAHAN**

1. Pelaksanaan kegiatan masih dihadapkan pada kurangnya daya dukung sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai, demikian juga dengan jabatan fungsional seperti arsiparis, perencana yang belum ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negri Provinsi NTB. Kondisi ini dipersulit lagi dengan terjadinya mutasi tenaga-tenaga potensial ke instansi lain.
2. Masih adanya pemahaman yang keliru tentang tugas dan fungsi Bakesbangpoldagri, yang hanya melihat dari sisi honor, sehingga pengalokasian anggaran terkadang tidak dapat mendukung secara penuh program dan kegiatan yang direncanakan
3. Penurunan rasa nasionalisme dan lemahnya rasa kebangsaan para komponen bangsa, termasuk anak didik kita sehingga ada yang tidak mampu menyebutkan teks Pancasila secara utuh dan benar, rasa apriori terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara maraknya perkelahian antar pemuda, pelajar, mahasiswa yang dipicu oleh masalah-masalah sepele, dekadensi moral yang disebabkan pengaruh globalisasi, dll sudah marak terjadi. Oleh karena itu perlu dukungan anggaran untuk mengembalikan jati diri bangsa melalui program-program wawasan Kebangsaan.
4. Anggaran Tim Terpadu (Timdu) terasa kurang memadai untuk mendukung operasional khususnya dalam upaya mengantisipasi berbagai kondisi yang berkembang (cegah dini, tangkal dini).

#### **B. UPAYA PENYELESAIAN**

1. Optimalisasi program kegiatan dengan memperhatikan relevansi dan urgensinya.
2. Memacu pelaksanaan kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
3. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait sebagai upaya cegah dini dan tangkal dini untuk menjaga stabilitas daerah.

5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait sebagai upaya untuk mengembalikan jati diri bangsa demi utuhnya NKRI

### C. REKOMENDASI

1. Pengajuan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga program-program yang dikembangkan dapat memberikan hasil yang optimal.
2. Pengajuan permintaan tenaga staf dan tenaga fungsional yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik pengetahuan/kemampuan kerja maupun integritasnya.
3. Waktu penetapan Perubahan anggaran pada akhir tahun dirasakan sangat menghambat jalannya kegiatan, untuk itu jika dimungkinkan waktu penetapan perubahan anggaran dilaksanakan pada triwulan II.
4. Faktor kenyamanan lingkungan merupakan daya dukung yang strategis dan vital didalam berbagai sektor pembangunan, untuk itu diperlukan perhatian yang lebih khusus.

### D. KESIMPULAN

1. Total pagu anggaran yang dikelola Bakesbangpoldagri TA. 2016 adalah sebesar Rp. 17.068.912.700,- yang terdiri dari Belanja Langsung (BL) Rp. 12.096.034.500,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.972.878.200,-
2. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 15.641.051.938,- (91,63%) dan realisasi fisik 99,41%
3. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan :
  - Tidak terealisasinya secara total dana untuk fasilitasi pengamanan Presiden dan atau wakil Presiden RI sebesar Rp. 343.611.300,- (2,01%) , dikarenakan berakhirnya jadwal kunjungan Presiden/dan atau Wakil Presiden RI ke Provinsi NTB pada Tahun anggaran tersebut (2016).
  - Adanya sisa belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 420.383.592,- (2,46%)
  - Adanya SILPA dari kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 394.248.000,- (2,31%)
  - Tidak selesainya 100% penyusunan Buku Biografi Tokoh NTB (Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa) sehingga tersisa anggaran sebesar Rp. 164.117.495,- (0,96%)
  - Adanya efisiensi belanja sebesar Rp. 105.500.375,- (0,62%)

4. Terhadap sisa anggaran dengan total Rp. 1.427.860.762,- (8,37%) telah dikembalikan ke Kas Daerah
5. Pada umumnya program dan kegiatan tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan walaupun pada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan oleh faktor luar, maka koordinasi dengan instansi, lembaga terkait dalam Provinsi, luar Provinsi maupun pemerintah pusat akan terus di tingkatkan.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Demikian Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai pertangungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat berguna atau sebagai bahan rujukan program/kegiatan dan bahan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Demikian dan terima kasih.

Mataram, Januari 2017  
BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DALAM NEGERIPROVINSI NTB,  
KEPALA

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611231 198203 1 440

## KEGIATAN DALAM GAMBAR



Kabid PNNK melaporkan kepada Kepala Kesbangpoldagri NTB dan peserta terkait dengan Pelaksanaan Rakor dan Silaturrahmi Forum Pembauran Kebangsaan tanggal 24-25 Februari 2016.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Bayu Windya, M.Si menyampaikan materi pada Rakor dan Silaturrahmi Forum Pembauran Kebangsaan.



Ketua MUI NTB, Prof. Syaiful Muslim sebagai narasumber pada kegiatan “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan pada tanggal 8 Maret 2016



Salah seorang peserta “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan” mengajukan pertanyaan kepada narasumber.



Kabid PNNK, H. Umar Berlian, S.Sos selaku moderator pada acara “Dialog Pengaruh Idiologi” Hotel Lombok Raya Mataram, 10 s/d 11 Maret 2016.



Salah seorang peserta “Dialog Pengaruh Idiologi” memberi komentar dan beberapa pertanyaan kepada narasumber



Focus Group Discussion/FGD bersama para Tokoh Masyarakat dalam Rangka Pembentukan Kampung Madani di Desa Sesat KLU pada tanggal 19 Maret 2017.



Lalu Prima sebagai Tokoh Masyarakat memberi komentar pada Focus Group Discussion/FGD di Desa Sesait.



Focus Group Discussion/FGD bersama para Tokoh Masyarakat dalam Rangka Pembentukan Kampung Madani di Doropeti Kab. Dompu pada tanggal 23 Maret 2017.



Peserta Focus Group Discussion/FGD di Desa Doropeti cukup serius memperhatikan arahan dari para pejabat lingkup Bakesbangpoldagri NTB dan Bakesbangpol Kab.Dompu.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Bayu Windya, M.Si bersama para narasumber kegiatan FGD Pembentukan Kampung Madani di Desa Kuta Kab.Lombok Tengah pada 31 Maret 2016.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Bayu Windya, M.Si berdialog secara langsung kepada seluruh peserta FGD Pembentukan Kampung Madani di Desa Kuta Kab.Lombok Tengah pada 31 Maret 2016.



Kabid PNNK, H. Umar Berlian, S.Sos memberi arahan dalam FGD Pembentukan Kampung Madani di Desa Bukit Damai Kab.Sumbawa Barat pada tanggal 4 April 2016.



Narasumber dan para peserta kegiatan FGD Pembentukan Kampung Madani di Desa Bukit Damai Kab.Sumbawa Barat.



Ketua FPK,.....menjadi narasumber pada Rakor dan Silaturrahmi Toga, Tomas, Todat, dan FKUB yang dilaksanakan di Hotel Tursina Dompu pada tanggal 24 s/d 25 Mei 2016.



Salah seorang peserta Rakor dan Silaturrahmi Toga, Tomas, Todat, dan FKUB di Dompu memberi komentar dan sarana kepada narasumber.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, memberi sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakor dan Silaturrahmi Temu Tokoh Lintas Agama dan Lintas Etnis di Provinsi NTB pada tanggal 26 Mei 2016.



Para peserta Rakor dan Silaturrahmi Temu Tokoh Lintas Agama dan Lintas Etnis dari unsur tokoh-tokoh agama dan etnis di NTB



Kepala Bakesbangpoldagri NTB dan Kepala BINDA NTB serta Kabid PNNK (dari kanan ke kekiri) pada Rakor dan Silaturrahmi Toga, Toma dan Todat pada tanggal 1 Juni 2016



Para peserta Rakor dan Silaturrahmi Toga, Toma dan Todat tampak serius menyimak materi yang disampaikan oleh Narasumber.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. lalu Syafi'i, MM (dua dari kanan) membuka secara resmi **Rakor dan Silaturrahmi, Toga, Toma, Todat dan FKUBdi** Kota Bimatanggal 23 s/d 24 Agustus 2016. Tampak Kepala BINDA NTB (paling kiri) dan Ketua MUI NTB.



Salah seorang peserta Rakor dan Silaturrahmi, Toga, Toma, Todat dan FKUB memberi komentar dan pertanyaan kepada narasumber.



Kabid PNNK melaporkan kepada Kepala Bakesbangpoldagri NTB dan peserta FGD I Lab. Sosial “Kampung Madani” di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB Jl. Pendidikan No. 2 Mataram, pada 12 Oktober 2016.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM dan para peserta FGD I Lab. Sosial “Kampung Madani”



Diskusi hangat pada FGD II Lab. Sosial “Kampung Madani” di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB Jl. Pendidikan No. 2 Mataram, pada 18 Oktober 2016



Tampak serius para peserta FGD II Lab. Sosial “Kampung Madani” di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM memberi arahan dan masukan pada FGD III Lab. Sosial “Kampung Madani” di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB Jl. Pendidikan No. 2 Mataram pada tanggal 24 Oktober 2016.



Ketua Bale Mediasi Desa, L. Mariyun sebagai narasumber pada FGD III Lab. Sosial “Kampung Madani” di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB Jl. Pendidikan No. 2 Mataram pada tanggal 24 Oktober 2016



Sekretaris Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Kataruddin, MH mewakili Kepala Badan memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran Narkoba dan Miras di Provinsi NTB di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB, Jl. Pendidikan No. 2 Mataram pada Tgl 27 Oktober 2016.



Para peserta Kegiatan Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran Narkoba dan Miras di Provinsi NTB tampak serius menyimak materi dari narsumber.



Tampak Kepala Bakesbangpoldagri NTB dan para peserta memperhatikan H. Lalu Normal Zusanna menerangkan slide paparan pada acara Workshop Lab. Sosial di. Kab.Loteng 7 Nopember 2016.



Dalam suasana santai, tampak para peserta workshop Lab. Sosial Kampung Madani di Kab.Loteng menyimak materi yang disampaikan.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM memberi sambutan dan sekaligus membuka secara resmi Rakor dan Silaturrahmi Toga, Toma, Todat, Toda dan FKUB pada tanggal 8 s/d 9 Nopember 2016.



Peserta Rakor dan Silaturrahmi Toga, Toma, Todat, Toda dan FKUB tanggal 8 s/d 9 Nopember 2016



Dalam rangka meningkatkan koordinasi penanganan keamanan daerah, Bakesbangpoldagri menyelenggarakan Rapat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada tanggal 22 Nopember 2016.



Tampak Kabid PMS dan PK (kanan), Drs. Sofyan pada Rapat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tanggal 22 Nopember 2016.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM memberi kata sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Seminar Lab. Sosial Kampung Madani yang diselenggarakan di Lesehan Green Asri Mataram pada tanggal 8 Desember 2016



Para peserta Seminar Lab. Sosial Kampung Madani.



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Bayu Windya, M.Si menyampaikan materi pada Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara yang diselenggarakan di Mataram pada tanggal 1 s/d 3 Maret 2016.



Para peserta Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara Mataram, 1 s/d 3 Maret 2016.



Rapat Evaluasi Kegiatan Tim Pokja Oprasi Darat tanggal 15 Maret 2016 di Ruang Rapat Polda NTB.



Pejabat Polda NTB didampingi Kepala BINDA NTB dalam Rapat Evaluasi Kegiatan Tim Pokja Oprasi Darat tanggal 15 Maret 2016 di Ruang Rapat Polda NTB.



Bertempat di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB, Jl. Pendidikan No. 2 Mataram pada tanggal 28 April 2016 diadakan Rapat Penyusunan SOP Tim Pokja Operasi Darat



Peserta Rapat Penyusunan SOP Tim Pokja Operasi Darat pada tanggal 28 April 2016.



Danrem 162/WB, Kol. Inf. Farid Ma'ruf, MA memberikan materi pada acara Orientasi Bela Negara Bagi Aparatur Sipil Pemuda se NTB di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB pada Tanggal 9 s/d 10 Agustus 2016



Para peserta Orientasi Bela Negara Bagi Aparatur Sipil Pemuda se NTB menyimak materi yang disampaikan narasumber



Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'I, MM (tengah) dan Kepala BNN NTB, Srijono (tengah) dalam acara Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan, Peredaran Narkoba dan Miras (Pekat) di Provinsi NTB di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB tanggal 15 September 2016



Siswa/siswi SMA di Mataram yang menjadi peserta Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan, Peredaran Narkoba dan Miras (Pekat) di Provinsi NTB pada tanggal 15 September 2016.



Kepala BNN NTB memberikan arahan pada Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan, Peredaran Narkoba dan Miras (Pekat) di Provinsi NTB pada tanggal 26 September 2016



Siswa/siswi SMA di Mataram yang menjadi peserta Penyuluhan, Pencegahan, Penyalahgunaan, Peredaran Narkoba dan Miras (Pekat) di Provinsi NTB pada tanggal 26 September 2016



Sambutan Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. H. Lalu Syafi'i, MM pada kegiatan Training of Trainer (ToT) 4 (empat) Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara bagi tenaga Pendidik/Guru se NTB di Mataram 15 s/d 16 Nopember 2016



Salah seorang peserta(ToT) 4 (empat) Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara mengajukan pertanyaan kepada narasumber



Kabid PNNK, Drs. H. Umar Berlian memberikan arahan kepada peserta Outbond Bela Negara tanggal 1 Desember 2016



Aksi para peserta Outbond Bela Negara di Arena outbond Suranadi Lombok Barat



Kepala Bakesbangpoldagri NTB (tengah), didampingi Kabid Orpol/Ormas dan Pejabat dari BPS NTB (kiri) pada acara FGD Pokja IDI di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB pada Oktober 2016



Para peserta acara FGD Pokja IDI di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB pada Oktober 2016



Pemaparan capaian IDI NTB oleh Kabid Bidang Statistik BPS NTB



Ketua LVRI NTB, Brigjen (Purn) TNI Abdul Kadir bersama Kepala Bakesbangpoldagri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada acara pembukaan Sarasehan Organisasi Sosial, Politik dan Budaya di Aula Kantor Bakesbangpoldagri NTB tanggal 15 September 2016.



Mustakim, ST., MT (staf perencana Bakesbangpoldagri NTB) selaku moderator Sarasehan Organisasi Sosial, Politik dan Budaya mengawali sesi pemaparan materi oleh narasumber Ketua LVRI dan Akademi (Dr. Syafrudin).



Peserta Sarasehan Organisasi Sosial, Politik dan Budaya



Sambutan Kepala Bakesbangpoldagri NTB pada acara Sarasehan Organisasi Sosial, Politik dan Budaya



Salah seorang peserta dari Kab. Lombok Tengah memberi komentar dalam Sarasehan Organisasi Sosial, Politik dan Budaya.